INFORMASI APBN 2019

APBN UNTUK MENDORONG INVESTASI DAN DAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

INFORMASI APBN 2019

APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia

Disusun oleh
Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

Penanggung jawab:
Direktur Jenderal Anggaran

Editor:
Direktur Penyusunan APBN

Kontributor:
Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN

Direktorat Jenderal Anggaran
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr Wahidin Raya No.1
www.anggaran.kemenkeu.go.id

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 23 November 2018, Rancangan Undang-undang APBN tahun 2019 telah resmi disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019. APBN tahun 2019 ini merupakan penjabaran tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, posisi APBN tahun 2019 semakin strategis sebagai instrumen Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam menopang perekonomian Indonesia agar tumbuh secara berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tema dari kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2019 yaitu **"APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia"**. Sesuai tema tersebut, Pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2019 yaitu: pertama, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kedua, Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Ketiga, efisiensi serta inovasi pembiayaan akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga akan menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global agar APBN dapat dijaga tetap sehat, adil, dan mandiri sehingga mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengawal setiap rupiah yang ada di dalam APBN, sudah semestinya publik mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan yang akan dijalankan pemerintah melalui APBN. Dengan demikian diharapkan masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap APBN dan dapat mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemerintah, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan APBN yang kredibel, transparan dan akuntabel, kami berharap buku Informasi APBN ini dapat menjadi salah satu sumber yang valid dan terpercaya dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai APBN tahun 2019 kepada masyarakat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun dan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga buku Informasi APBN 2019 ini dapat diterbitkan. Terima Kasih.

Alur Penyusunan

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI

Januari 2018
Penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

Maret 2018
Penyusunan *resource envelope*

16 April 2018
Surat Bersama Pagu Indikatif dan Rancangan RKP

18 Mei 2018
Pengajuan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP ke DPR

19 Juli 2018
Surat Bersama Pagu Anggaran dan Penyelesaian Penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga

16 Agustus 2018
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Pengajuan RAPBN (RUU dan Nota Keuangan)

31 Oktober 2018
Sidang Paripurna Penetapan APBN 2019

23 November 2018
UU Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN tahun 2019

29 November 2018
Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 tentang Rincian APBN TA 2019

11 Desember 2018
Penetapan dan Penyerahan DIPA

APBN 2019

APBN untuk mendorong investasi & daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia

Postur APBN Sehat, Adil, & Mandiri

- Antisipatif dan fleksibel menghadapi dinamika perekonomian global
- Defisit anggaran terendah sejak 2013
- Keseimbangan primer mendekati Rp0
- Pembiayaan utang menurun

Penerimaan negara terus dioptimalkan

- Optimal namun tetap realistis
- Tetap menjaga iklim usaha & investasi
- Peningkatan PNBP melalui peningkatan layanan dan tata kelola

Belanja negara semakin produktif

- Reformasi belanja negara fokus untuk mendukung daya saing, ekspor, dan investasi
- Penguatan *value for money*
- Sinergi pusat dan daerah
- Semakin transparan dan akuntabel

Memperkuat belanja untuk bencana alam dan mempercepat pembangunan di daerah

- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Prov. NTB dan Sulteng
- Memperkuat Pemerintahan Daerah ditingkat Kelurahan

Hal Baru dan Strategis

Beberapa kebijakan dan terobosan dalam APBN 2019 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara dan kemandirian APBN
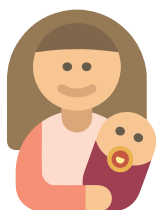
PENGUATAN BIDANG KESEHATAN MELALUI PROGRAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

- Perluasan program percepatan penanganan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 kabupaten/kota

PENAJAMAN ANGGARAN PENDIDIKAN

- Peningkatan kualitas dan relevansi **pendidikan vokasi** melalui standardisasi mekanisme *link and match* antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri
- Pengalokasian **dana abadi penelitian** untuk percepatan pengembangan riset

PENGUATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

- Penguatan program PKH melalui peningkatan besaran manfaat pada komponen pendidikan dan kesehatan

TAX EXPENDITURE

- Insentif perpajakan sebagai transfer sumber daya kepada publik berupa pengurangan kewajiban pajak untuk mendukung daya saing industri nasional dan mendorong hilirisasi industri.
- Untuk pertama kalinya disampaikan perhitungan belanja perpajakan (*tax expenditure*) sebesar Rp143,6 T (1,16% dari PDB) pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar Rp154,7 T (1,14% dari PDB)

POOLING FUND BENCANA ALAM

- Dana penanggulangan bencana alam (*pooling fund*) yang dikelola khusus, untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam
- Untuk pertama kalinya dialokasikan Rp 1,0 triliun
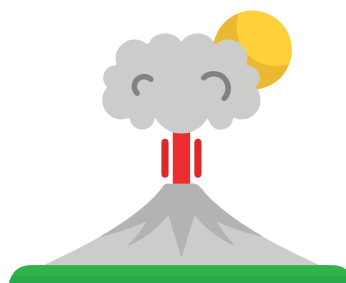
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELAUI SKEMA KPBU

- Keterlibatan Peran Swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui KPBU AP
- Terdapat 10 Proyek Infrastruktur yang akan menggunakan skema KPBU AP pada tahun 2019

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT KELURAHAN MELALUI DAU TAMBAHAN

- Menjaga keseimbangan percepatan pembangunan antara kelurahan dengan desa melalui pendanaan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
- Tanpa mengurangi komitmen kebijakan pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD.
- Dana Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan dialokasikan Rp3,0 T kepada 8.212 kelurahan

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

- Pada asumsi dasar ekonomi makro APBN 2019, hanya nilai tukar rupiah dan *lifting* minyak yang mengalami perubahan dari asumsi yang diajukan Pemerintah di RAPBN 2019.
- Nilai tukar disesuaikan secara cepat untuk mengantisipasi kondisi global agar APBN menjadi lebih realistis dan kredibel dari Rp14.400 (RAPBN) menjadi Rp15.000 (APBN)

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Suku Bunga SPN (%)

5,0

Inflasi (%)

3,5

3,2*)

3,6

Harga Minyak (US$/barrel)

68

51

Nilai Tukar (Rp/USD)

14.248*)

13.384

Lifting Minyak (ribu barrel/hari)

776

804

Lifting Gas (ribu barrel setara minyak/hari)

1.250

1.136

1.142

*) Outlook menyesuaikan dengan realisasi s.d. bulan November 2018

Perekonomian Global

Perekonomian global mengalami perbaikan dengan Amerika Serikat menjadi salah satu motor utama.
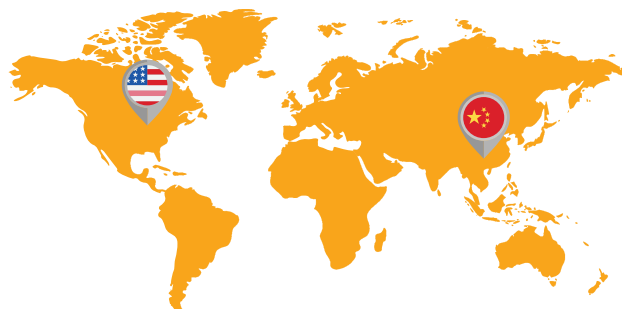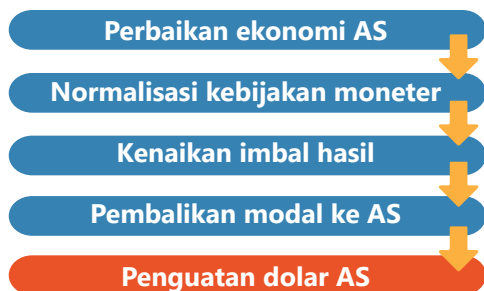
Beberapa risiko dan tantangan bagi perekonomian global ke depan:

Tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter AS

Moderasi Tiongkok

Proteksionisme

Perang Dagang AS-Tiongkok

Ketegangan geopolitik

Perubahan iklim/cuaca ekstrim

Proyeksi Pertumbuhan Global (%, yoy)

- Perekonomian global masih menyimpan risiko ketidakpastian sebagai dampak kebijakan ekonomi di Amerika Serikat serta lanjutan perang dagang dengan Tiongkok.
- Kondisi ini berimbas pada perekonomian banyak negara khususnya negara-negara berkembang dan masih akan berlangsung ditahun 2019
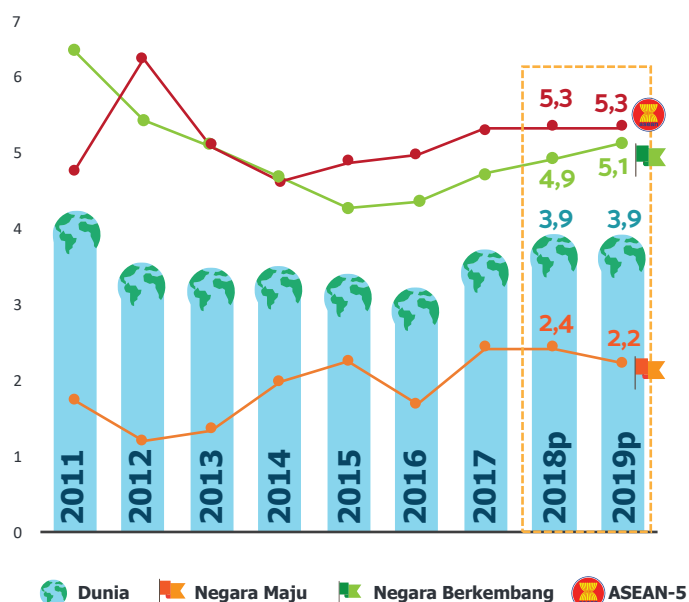
Pertumbuhan PDB

Investasi meningkat, meskipun konsumsi masih mendominasi

*) dalam persen

	2017	2018 Outlook	APBN 2019
Pertumbuhan PDB	5,1	5,2	5,3
Konsumsi RT & LNPRT	5,0	5,1	5,1
Konsumsi Pemerintah	2,1	4,2	5,4
PMTB	6,2	6,9	7,0
Ekspor	9,1	7,2	6,3
Impor	8,1	11,5	7,1
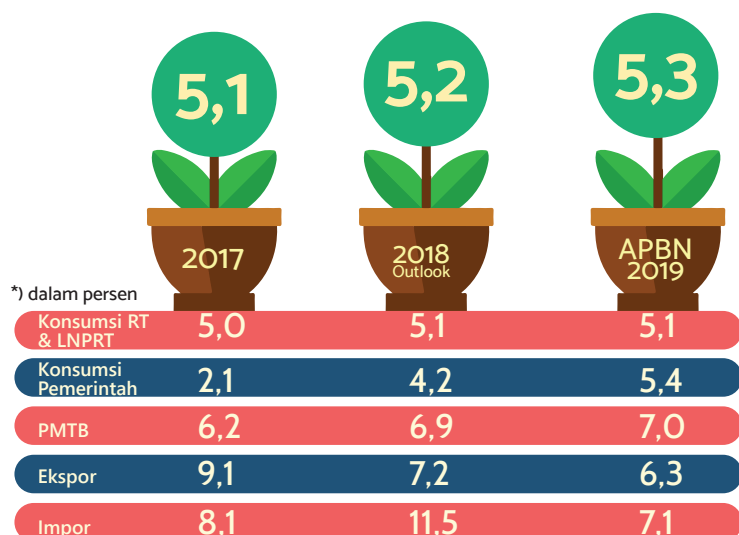
Perkiraan oleh Berbagai Institusi (%)

Institusi	2018	2019
World Bank	5,1	5,4
IMF	5,3	5,5
Asian Development Bank	5,2	5,3
OECD	5,3	5,4
Consensus Forecast	5,2	5,3

Pendorong

Penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong investasi.

Pemilu diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, organisasi sosial dan partai politik serta belanja pemerintah.

Tantangan

Kebijakan suku bunga acuan atas respon kenaikan FFR

Perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang tetap dan perkiraan pertumbuhan volume perdagangan yang sedikit turun

Keberlanjutan perang dagang antara AS dan Tiongkok

Tahun pemilu dimana terdapat tendensi investor untuk *wait and see* setelah hasil Pemilu

Dorongan Kebijakan Fiskal

Dalam menjaga momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi di tengah pencapaian *stability over growth*

Perbaikan iklim investasi yang berorientasi ekspor dan peningkatan daya saing untuk memperbaiki struktur transaksi berjalan.

Pengembangan industri hulu yang akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku.

Dengan adanya risiko perang dagang, langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk memperbaiki struktur neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan.

Nilai Tukar

Pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh faktor domestik dan luar negeri
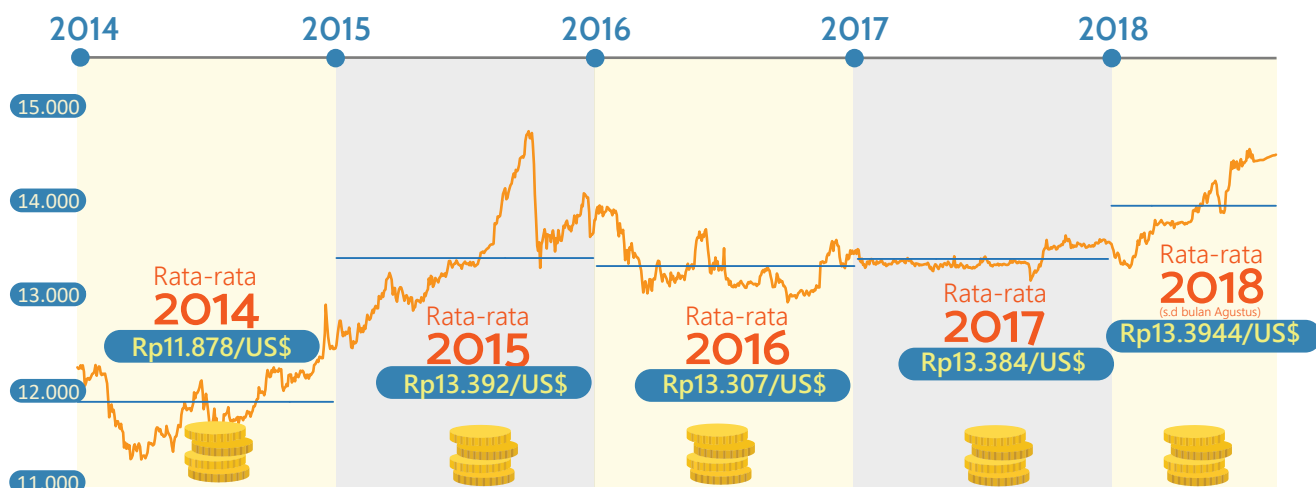
Kondisi ekonomi dunia diperkirakan masih bergejolak di tahun 2019

- Normalisasi kebijakan moneter AS yang disebabkan oleh perbaikan kinerja perekonomian AS
- Kebijakan fiskal AS yang cenderung ekspansif menyebabkan meningkatnya defisit dan yield US T Bills
- Kebijakan perdagangan proteksionis
- Kenaikan harga minyak dunia, permasalahan geopolitik

Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah perlu didukung oleh:

- Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat (inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang sehat, serta peningkatan peringkat utang dan EODB)
- Kebijakan stabilisasi nilai Rupiah secara terukur sesuai dengan fundamental ekonomi oleh Bank Indonesia didukung cadangan devisa yang kuat
- Penguatan koordinasi kebijakan terus berlangsung dalam rangka memperbaiki stabilitas makroekonomi, termasuk koordinasi penyediaan pasokan dan kebutuhan valuta asing di antara BUMN

Masih berlangsungnya kebijakan suku bunga rendah di Eropa dan Jepang
mengimbangi potensi *capital outflows* lanjutan

Inflasi

Perkembangan perekonomian global dan domestik, seperti harga komoditas dan pergerakan nilai tukar Rupiah akan turut mempengaruhi pergerakan laju inflasi
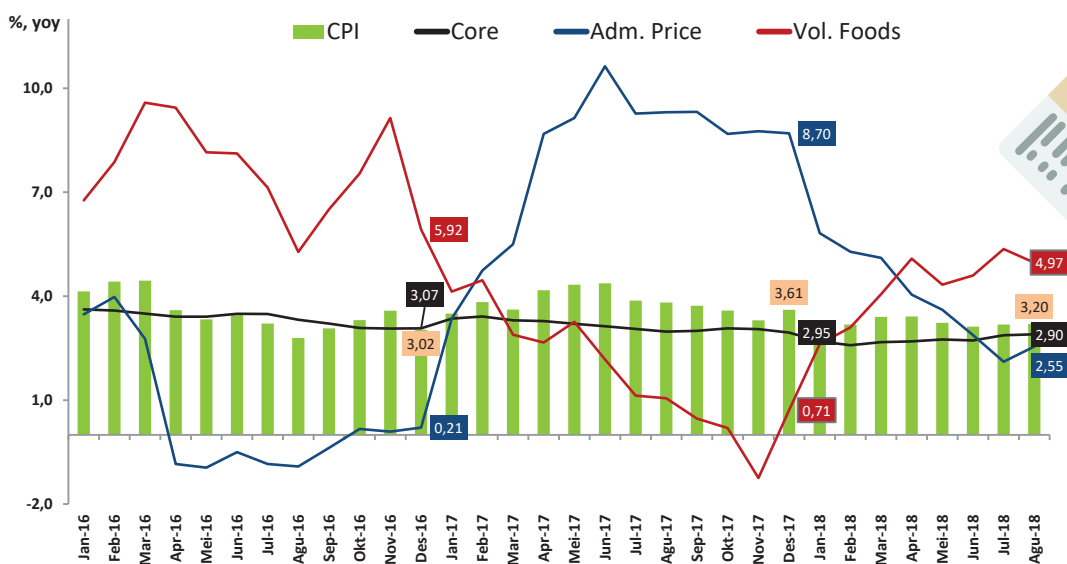
Laju inflasi dapat terus terjaga dengan tren menurun, khususnya didukung oleh tren inflasi inti yang terus menurun dan stabil di tingkat yang rendah.

Sumber tekanan terutama berasal dari komponen *volatile food*, khususnya bahan pangan, walaupun volatilasnya semakin menurun dari tahun ke tahun.

Pengelolaan kebijakan harga energi saat ini mampu menurunkan tekanan *administered price*, namun tetap perlu diwaspadai risiko dan tekanan di periode ke depan.

Sasaran inflasi 2019-2021 ditetapkan 3,5+1,0%, dan terus menurun dalam jangka menengah untuk mendukung terjaganya daya beli masyarakat.

Strategi dasar adalah dengan menjaga keseimbangan ketersediaan pasokan dan permintaan barang, kelancaran distribusi, perbaikan efisiensi pasar, serta didukung upaya pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat

Harga Minyak Mentah

Pergerakan harga minyak mentah masih cenderung berfluktuasi, dipengaruhi oleh risiko geopolitik dan perkembangan perekonomian global
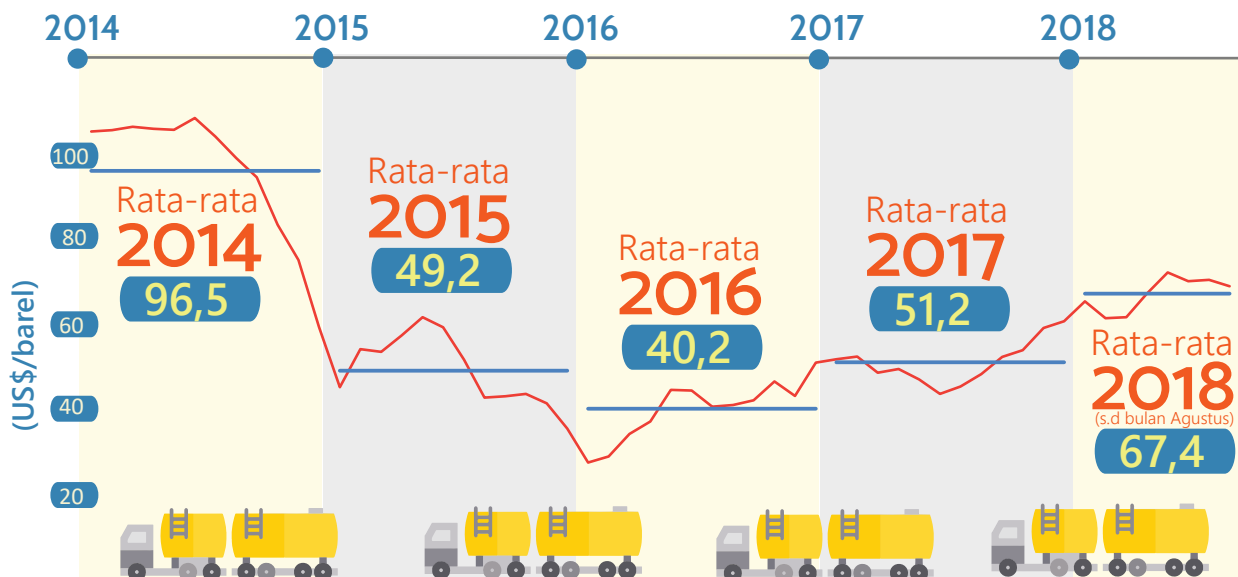
ICP bergerak seiring dengan perkembangan harga minyak mentah acuan dunia, terutama Brent.
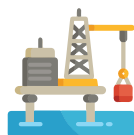
Faktor pendorong kenaikan harga adalah ketegangan geopolitik di beberapa negara penghasil minyak, sentimen pemangkasan produksi OPEC di tahun 2018, dan sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela.

Faktor penghambat kenaikan harga, a.l. ketidakpastian keberlanjutan pemangkasan produksi oleh OPEC dan Rusia, penggunaan energi alternatif dan peningkatan produksi *shale oil*

APBN 2019

Adil, sehat, dan mandiri dimana defisit dijaga pada angka 1,84% dengan *primary balance* mendekati Rp0
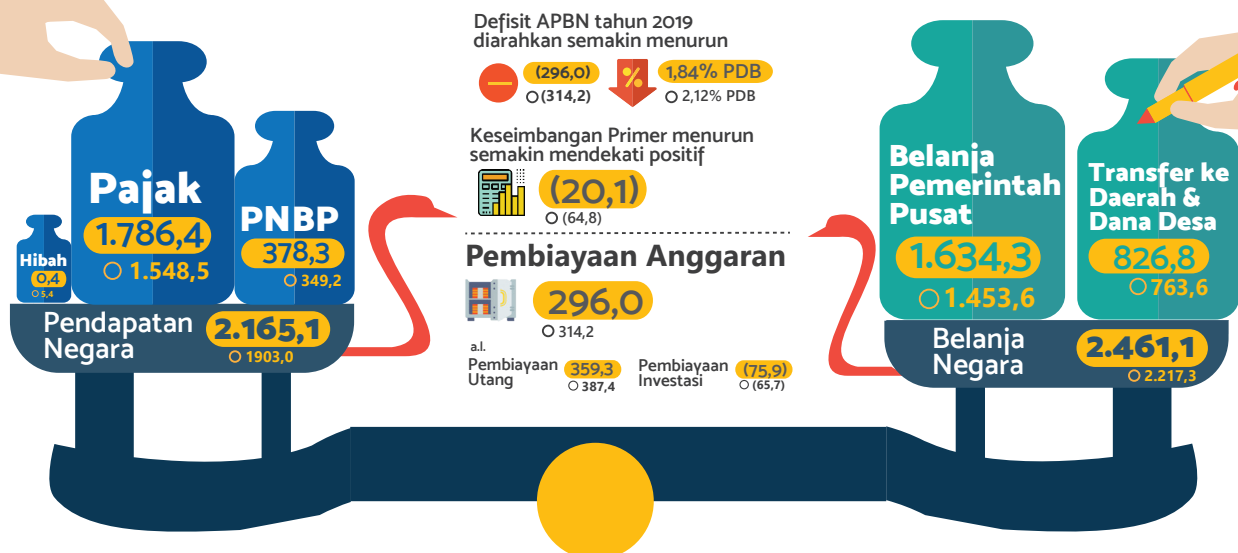
Uraian (triliun Rupiah)	2016 LKPP	2017 LKPP	2018 Outlook	2019 APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.555,9**	**1.666,4**	**1.903,0**	**2.165,1**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.546,9**	**1.654,7**	**1.897,6**	**2.164,7**
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4
Tax Ratio (%)	*0,01*	*0,01*	*11,57*	*12,22*
a.l. PPh Migas	666,2	646,8	761,2	894,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	262,0	311,2	349,2	378,3
II. PENERIMAAN HIBAH	**9,0**	**11,6**	**5,4**	**0,4**
B. BELANJA NEGARA	**1.864,3**	**2.007,4**	**2.217,3**	**2.461,1**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**1.154,0**	**1.265,4**	**1.453,6**	**1.634,3**
1. Belanja K/L	684,2	765,1	813,5	855,4
2. Belanja Non K/L	469,8	500,2	640,2	778,9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	**710,3**	**742,0**	**763,6**	**826,8**
1. Transfer ke Daerah	663,6	682,2	703,6	756,8
2. Dana Desa	46,7	59,8	60,0	70,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(125,6)**	**(124,4)**	**(64,8)**	**(20,1)**
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(308,3)**	**(341,0)**	**(314,2)**	**(296,0)**
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	*(2,49)*	*(2,51)*	*(2,12)**	*(1,84)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**334,5**	**366,6**	**314,2**	**296,0**
I. PEMBIAYAAN UTANG	**403,0**	**429,1**	**387,4**	**359,3**
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(89,1)	(59,8)	(65,7)	(75,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1,7	(2,1)	(6,5)	(2,4)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(0,7)	(1,0)	(1,1)	0,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19,6	0,4	0,2	15,0

* *Outlook* pada laporan semester I dan pada akhir tahun diperkirakan akan dibawah 2,0% terhadap PDB

APBN Sehat

Defisit semakin turun dan Keseimbangan Primer menuju arah positif sehingga APBN menjadi *sustainable* dan *prudent*
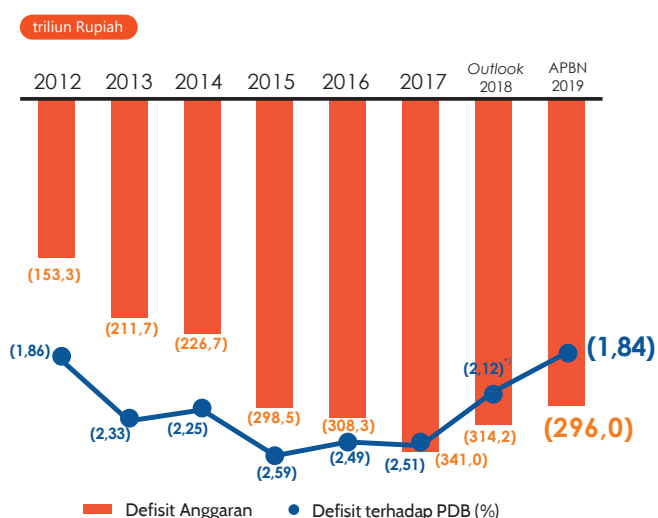
Rasio Defisit APBN diturunkan menjadi 1,84% PDB, terendah sejak tahun 2013

*) Outlook pada Laporan Semester I tahun 2018. Sesuai proyeksi terkini, defisit APBN tahun 2018 diperkirakan dibawah 2% terhadap PDB (pada kisaran 1,8-1,9% terhadap PDB dengan defisit keseimbangan primer Rp6,7 T-Rp21,4 T)
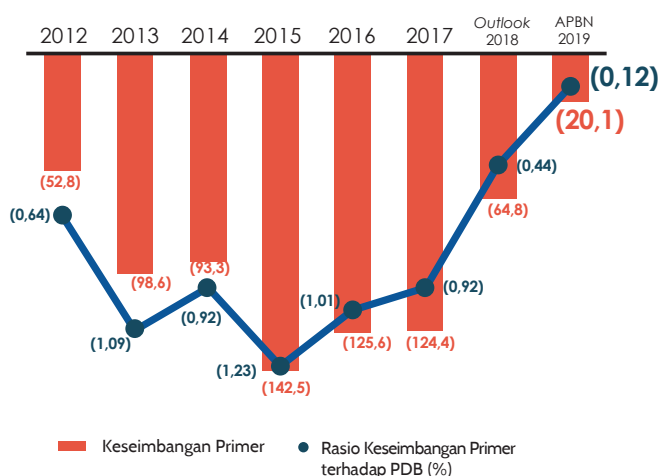
Keseimbangan Primer mendekati Rp0 --> konsisten turun sejak 2015

APBN Mandiri

Ditunjukkan dengan penerimaan pajak menjadi sumber utama belanja negara dan tumbuh lebih realistis
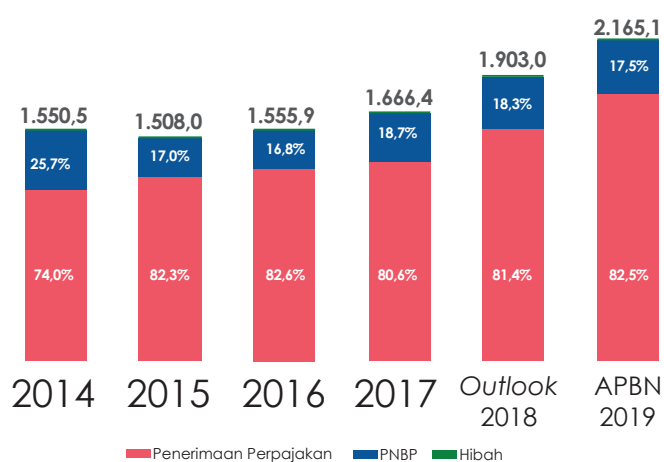
Kontribusi perpajakan terus meningkat menjadi 82,5% (2014: 74,0%)
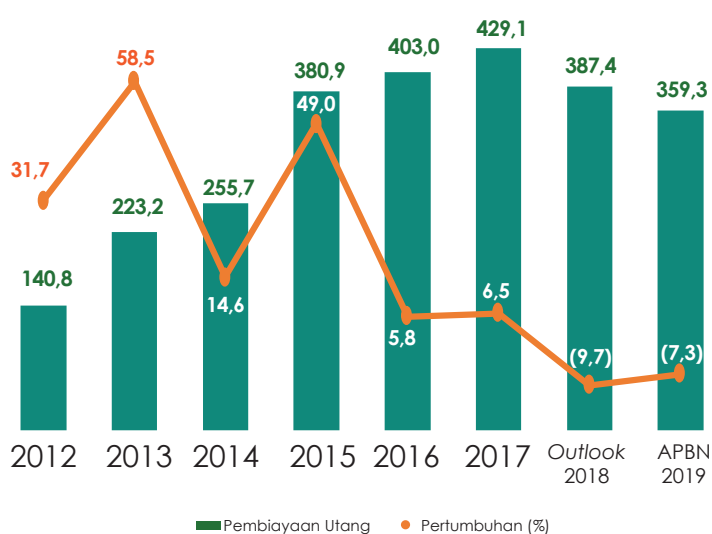
Pembiayaan utang semakin menurun

APBN Adil

Ditunjukkan dengan keseimbangan antara Pembangunan Fisik dan SDM, Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pajak yang progresif

Pajak Menjadi Insentif Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat & Ekonomi

Kenaikan PTKP
2013 : Rp24,3 juta
2016 : Rp54,0 juta

Penurunan tarif PPh UMKM menjadi 0,5%

Insentif Pajak bagi Dunia Usaha secara *targeted* (*tax holiday/allowance*)

Kriteria/syarat tertentu a.l :

Industri Pionir

Mempertimbangkan nilai investasi, orientasi ekspor, dan penyerapan tenaga kerja

Penguatan dan Keseimbangan Pembangunan Fisik dan SDM*

Anggaran Infrastruktur
2015 : Rp256,1 T
2019 : Rp415,0 T

Anggaran Kesehatan
2015 : Rp69,3 T
2019 : Rp123,1 T

Anggaran Pendidikan
2015 : Rp390,3 T
2019 : Rp492,5 T

Anggaran Perlindungan Sosial
2015 : Rp249,4 T
2019 : Rp381,0 T

** Anggaran-anggaran di atas memiliki irisan*

Memperkokoh keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah
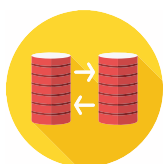
Transfer ke Daerah & Dana Desa:
2015 : Rp623,1 T
2019 : Rp826,8 T

hampir sama

Belanja K/L
2015 : Rp732,1 T
2019 : Rp855,4 T

Pendapatan Negara

Rp2.165,1 T

Pajak Sumber Utama Pendapatan

Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyempurnaan regulasi dan IT Pajak serta PNBP terus dioptimalkan dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat
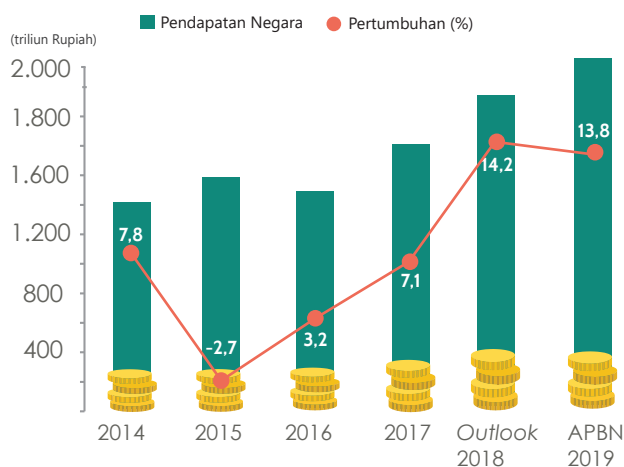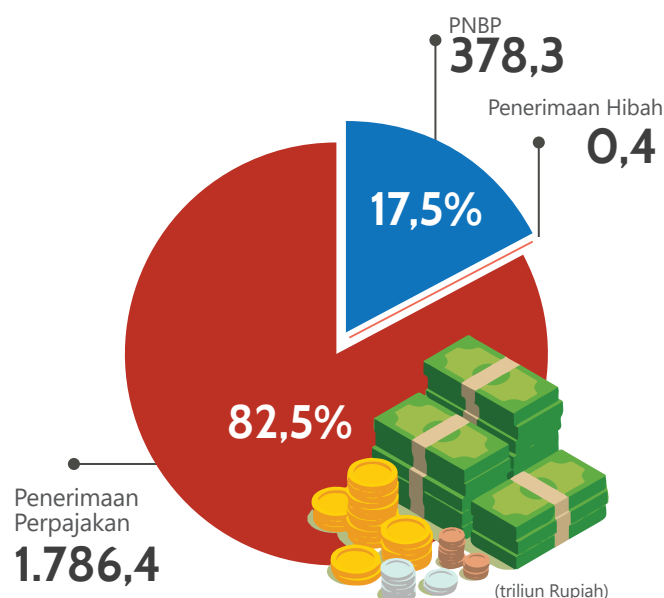
- Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,9% selama periode tahun 2014-2019.
- APBN 2019, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp2.165,1 triliun
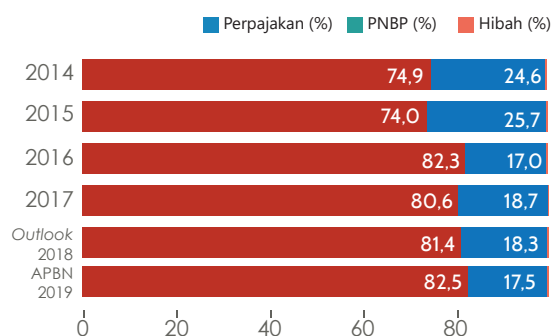
Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 82,5% di dalam APBN 2019. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 17,5%, dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.

Penerimaan Perpajakan

PPh dan PPN merupakan kontribusi utama, sebesar 50,1% dan 36,7% terhadap penerimaan perpajakan
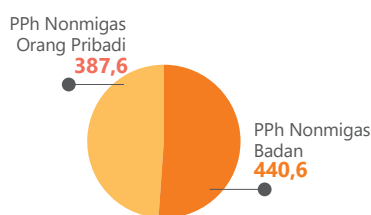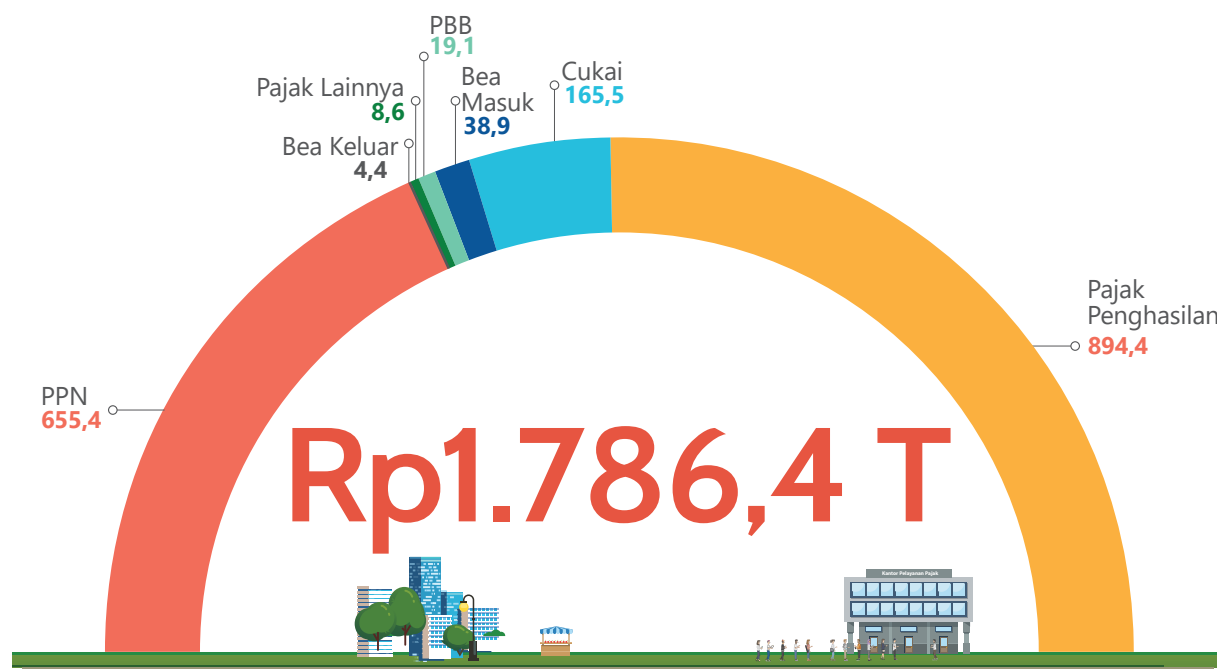
PPh Nonmigas

Kenaikan PPh Non Migas didominasi oleh PPh Nonmigas Badan
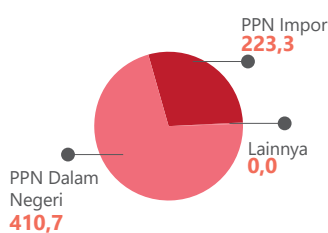
PPN

Kenaikan PPN didukung oleh upaya pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga
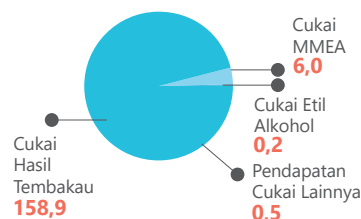
Cukai

Kenaikan cukai didorong oleh penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan program penertiban rokok ilegal

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan tetap realistis, diperkirakan tumbuh 15,4 % dari *outlook* APBN 2018 dengan didukung reformasi perpajakan

2019 tumbuh

15,4%

Pertumbuhan 2019 lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir (11,1%)
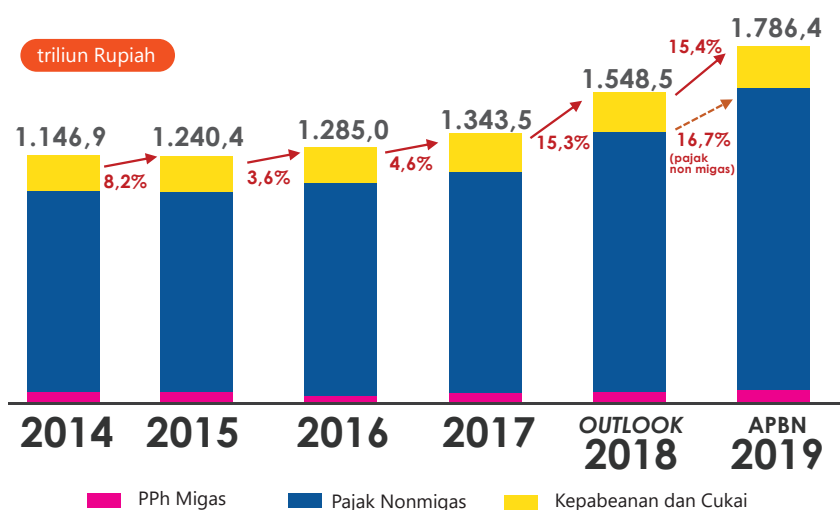
Insentif Fiskal

Pemerintah tetap menjaga keberlangsungan iklim investasi dan peningkatan daya saing dengan memberikan insentif fiskal meskipun target penerimaan pajak meningkat.

Insentif perpajakan yang tepat sasaran mendorong Pemerintah mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian. Kebijakan belanja perpajakan (*tax expenditure*) sebesar

1,1% dari PDB

Perkembangan *Tax Ratio*

Tax ratio diperkirakan akan lebih tinggi dengan diperhitungkannya unsur insentif atau pengurangan kewajiban perpajakan yang sekarang telah diberikan pemerintah *(tax expenditure)*
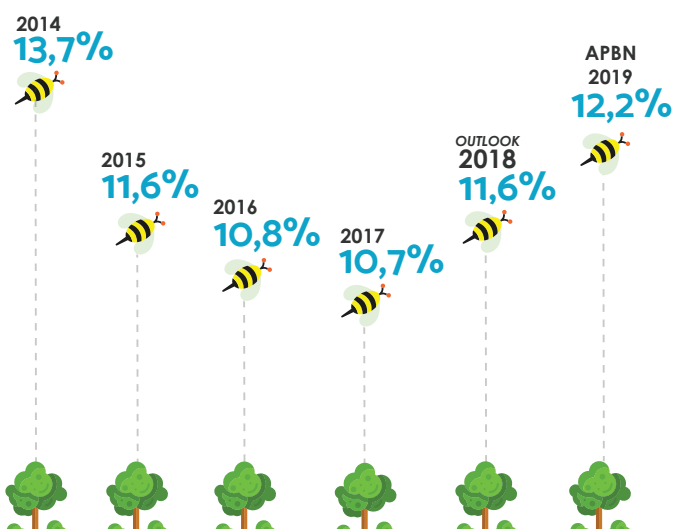
Penerimaan Perpajakan

Kebijakan perpajakan berdasarkan asas keadilan mendorong daya saing industri dan kemudahan berusaha
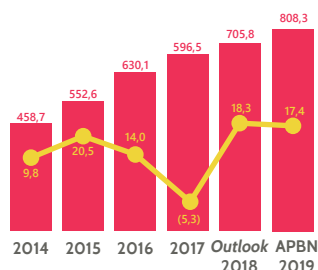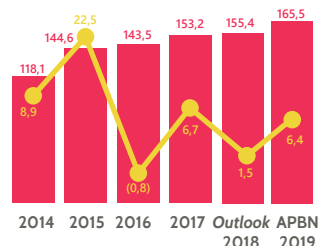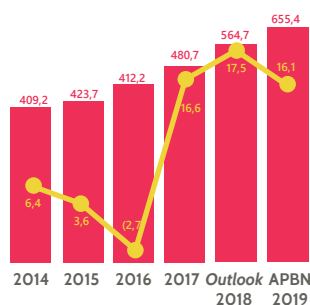
Pajak Perdagangan Internasional, 2014-2019
(triliun rupiah)
Pajak Perdagangan Internasional turun rata-rata **0,7%**
Pajak Perdagangan Internasional
Pertumbuhan (%)
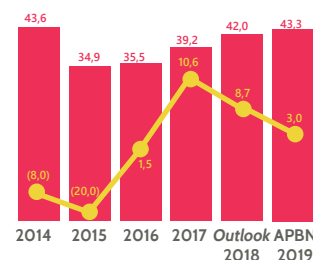
Kebijakan di Bidang Perpajakan

Automatic Exchange of Information (AEoI)

meningkatkan basis pajak mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (*Base Erosion Profit Shifting*)

Data dan Sistem Informasi Perpajakan

up to date dan terintegrasi a.l. melalui *e-filing*, *e-form* dan *e-faktur*.

SDM dan Organisasi

Peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi

Kepatuhan Wajib Pajak

membangun kesadaran pajak (*sustainable compliance*) a.l. melalui *e-service*, *mobile tax unit*, KPP Mikro, dan *outbond call*.

Insentif Perpajakan

tax holiday dan *tax allowance* reviu kebijakan *exemption tax* pada beberapa barang kena PPN.

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Pengembangan/perluasan fasilitas untuk industri kecil dan menengah (IKM)

Memperbaiki dwelling time

Percepatan layanan Pusat Logistik Berikat dan simplifikasi prosedur ekspor

Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Penggunaan IT untuk administrasi pemungutan dan pemberantasan penyelundupan

Barang Kena Cukai (BKC) baru

Penambahan barang kena cukai (BKC) baru (kemasan plastik)

PNBP

(Penerimaan Negara Bukan Pajak)

PNBP tahun 2019 ditargetkan tumbuh 8,35% dari *outlook* tahun 2018,

- **Optimalisasi produksi**
  diikuti upaya efisiensi biaya dan mendukung pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan dan keberlangsungan usaha

- **Peningkatan dividen BUMN**
  dengan mempertimbangkan *cashflow* BUMN dan kemampuan keuangan BUMN dengan pengembangan usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah

- **Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif**
  dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

- **Perbaikan tata kelola (Revisi UU PNBP)**
  - Penyederhanaan tarif PNBP, khususnya terkait layanan
  - Penajaman perencanaan, pelaksanaan & pertanggung jawaban PNBP
  - Penguatan pengawasan dan pemeriksaan PNBP
  - Rumusan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP

PNBP

(Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Peningkatan PNBP didorong kenaikan harga minyak, peningkatan kualitas dan volume layanan, serta perbaikan tata kelola
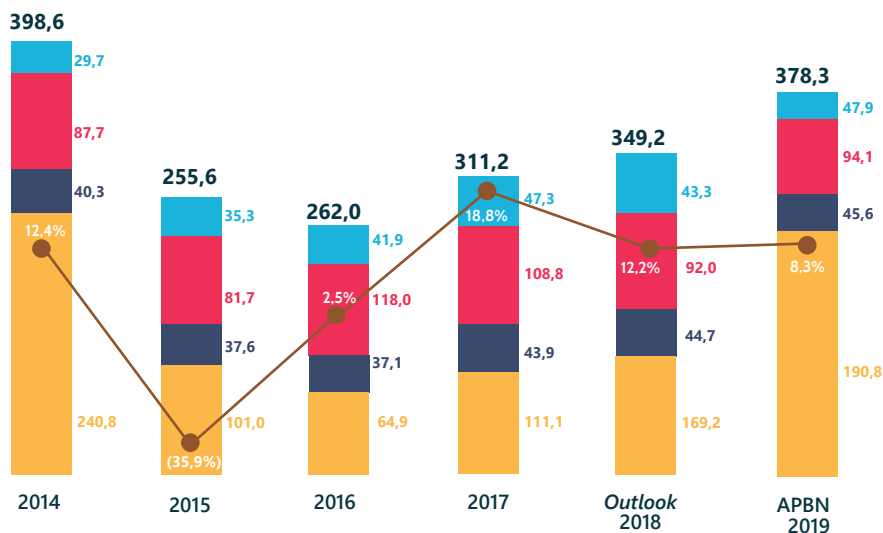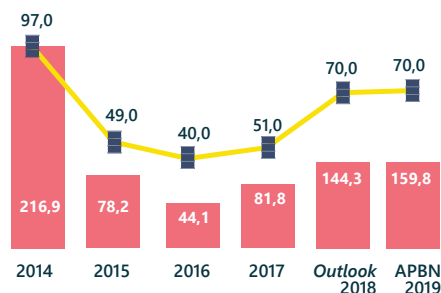
	2014	2015	2016	2017	Outlook 2018	APBN 2019
Pertambangan Umum	19,3	17,7	15,8	23,8	19,3	25,0
Kehutanan	3,7	4,2	3,8	4,1	4,2	4,5
Perikanan	0,2	0,1	0,4	0,5	0,6	0,6
Panas Bumi	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9
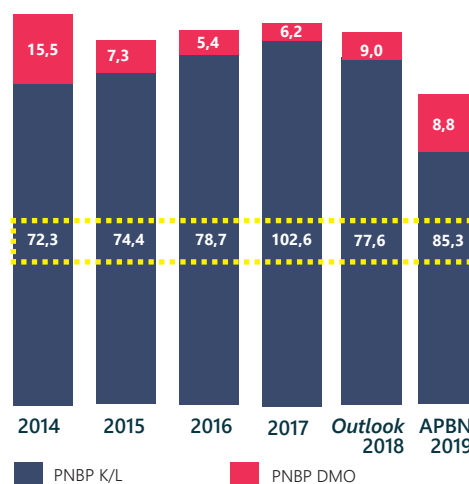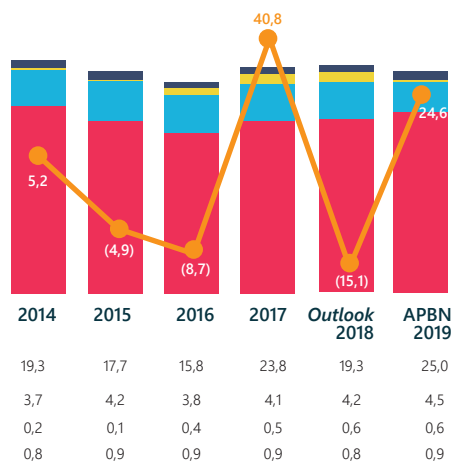
- PNBP K/L ditargetkan sebesar Rp94,1 triliun, dengan kontribusi terbesar Kementerian Kominfo, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Perhubungan
- Potensi PNBP K/L masih dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan masyarakat

Belanja Negara

Rp2.461,1 T

Belanja Negara

diarahkan mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dengan tetap menjaga efisiensi

Aparatur

- mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara antara lain dengan mempertahankan gaji dan pensiun ke-13, pemberian THR bagi pegawai aktif dan pensiunan, serta kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok sebesar 5%

Efektivitas & Efisiensi Belanja

- mendukung penguatan belanja yang bersifat produktif, dan melanjutkan efisiensi belanja yang bersifat non-produktif
- meningkatkan kualitas belanja untuk peningkatan kapasitas produksi dan konektivitas, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi program

Mendukung Program Prioritas

- Sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam bantuan sosial
- *Refocusing* anggaran prioritas
- Sinergi pembangunan antara Pusat dan Daerah
- Dukungan pemerintah terhadap *creative financing*

Belanja Pemerintah Pusat
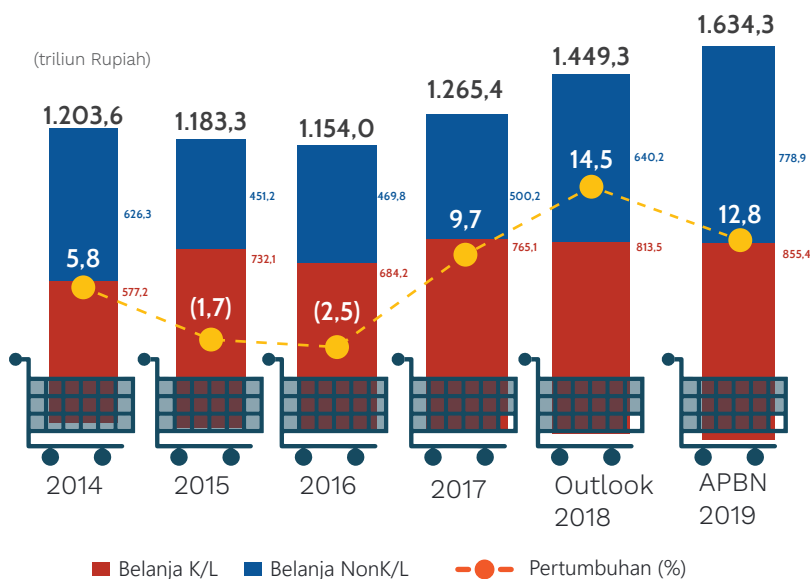
Belanja K/L
Rp855,4 T
2018: 813,5

Belanja Non K/L
Rp778,9 T
2018: 640,2

antara lain:

Subsidi Energi **Rp160,0 T**

Pembayaran Pensiun **Rp101,4 T**

Pembayaran Bunga Utang **Rp275,9 T**

Fokus Belanja Pemerintah

1 Pembangunan Sumber Daya Manusia
- Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi
- Mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif
- Memperkuat program promotif dan preventif, peningkatan layanan kesehatan, dan menjaga keberlanjutan JKN
- Pemerataan akses ke layanan kesehatan

2 Penguatan Infrastruktur
- Infrastruktur pelayanan dasar
- Infrastruktur konektivitas untuk kelancaran barang dan jasa
- Infrastruktur untuk mendukung sektor unggulan (a.l. pangan, pariwisata, perikanan)
- Dukungan pendanaan proyek-proyek infrastruktur dengan skema pembiayaan kreatif (KPBU)

3 Mendorong efektivitas Program Perlindungan Sosial
- Sinergi program perlindungan sosial (PKH, BPNT, Subsidi)
- Penerima manfaat subsidi dan bansos yang lebih tepat sasaran → perbaikan data
- Penguatan PKH dan BPNT, serta perluasan sasaran JKN (PBI)

4 Pelaksanaan Agenda Demokrasi
- Pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2019
- Pengamanan Pemilu 2019
- Sosialisasi Pemilu 2019
- Dukungan penyiaran kegiatan Pemilu 2019

5 Birokrasi yang Efektif dan Efisien
- Produktivitas, integritas, dan pelayanan publik (a.l. tetap memberikan gaji dan tunjangan ke-13, pemberian THR, serta kenaikan gaji pokok rata-rata 5%)`

6 Antisipasi ketidakpastian
- Mitigasi risiko bencana antara lain melalui pembentukan dana siaga bencana serta skema lainnya
- Pelestarian lingkungan
- Stabilitas ekonomi, keamanan & politik

Belanja K/L

Dialokasikan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional

Anggaran Belanja K/L, 2014-2019

(triliun Rupiah)

Tahun	Belanja K/L	Pertumbuhan (%)
2014	577,2	(1,0)
2015	732,1	26,8
2016	684,2	(6,5)
2017	765,1	11,8
Outlook 2018	813,5	6,3
APBN 2019	855,4	5,2

Belanja K/L — Pertumbuhan (%)
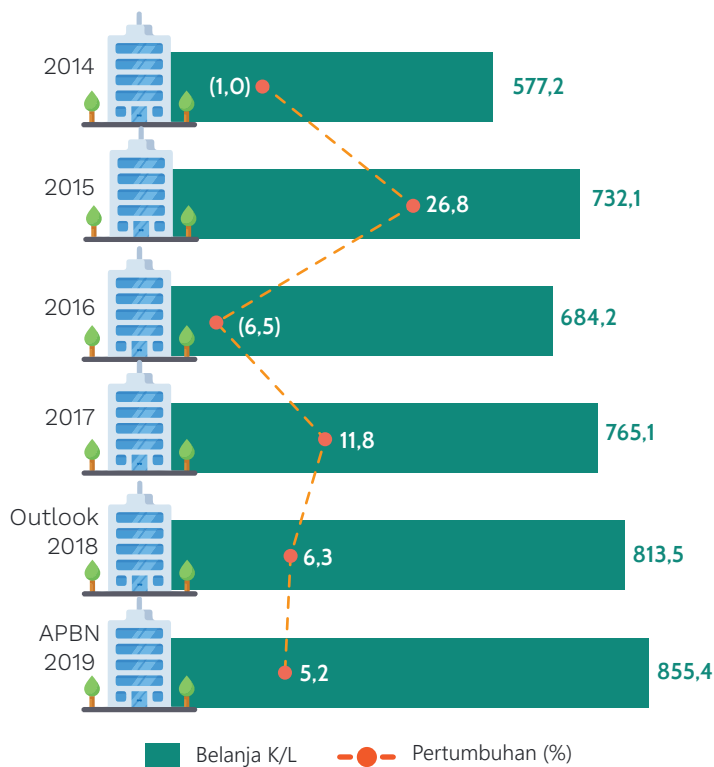
Perbaikan Pengelolaan Belanja K/L

Fokus Prioritas

- penajaman dan penguatan program prioritas

Monitor Hasil

- komprehensif dan terkoordinasi melalui sinergi sistem informasi

Sinergi

- koordinasi pengelolaan anggaran strategis (vokasi, promosi, riset, pembangunan sarpras pendidikan)

Inovasi

- mengembangkan skema pembiayaan dengan meningkatkan peran swasta untuk proyek infrastruktur (Skema KPBU-AP)

Efisiensi & Efektivitas

- *capping* belanja barang untuk meningkatkan pendanaan program prioritas

Percepatan Pelaksanaan

- kegiatan melalui lelang dini melalui perencanaan yang lebih baik
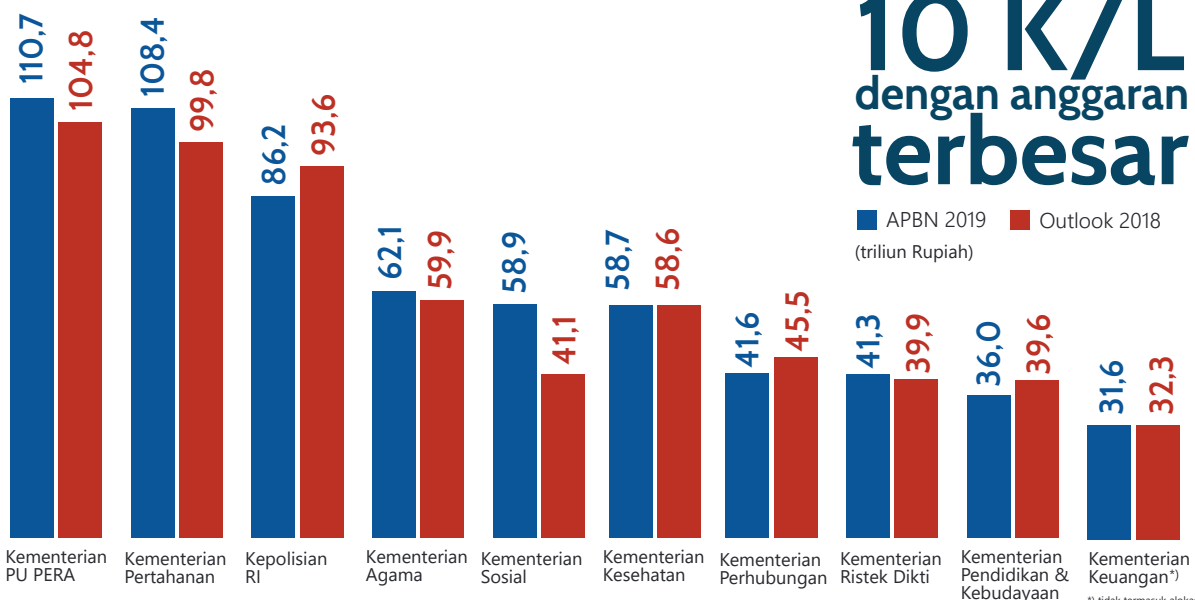
Belanja Pemerintah Pusat
Menurut Fungsi

Menggambarkan fokus pemerintah dalam melaksanakan berbagai prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

Outlook 2018
(triliun Rupiah)

Peningkatan Signifikan

pada beberapa fungsi disebabkan oleh:

a. **Fungsi Pelayanan Umum**
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan mendukung pelaksanaan pemilu 2019

b. **Fungsi Ekonomi**
untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi

c. **Fungsi Perlindungan Sosial**
untuk menjaga konsistensi penurunan jumlah penduduk miskin terutama melalui penguatan program PKH, serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/Polri

APBN 2019
(triliun Rupiah)
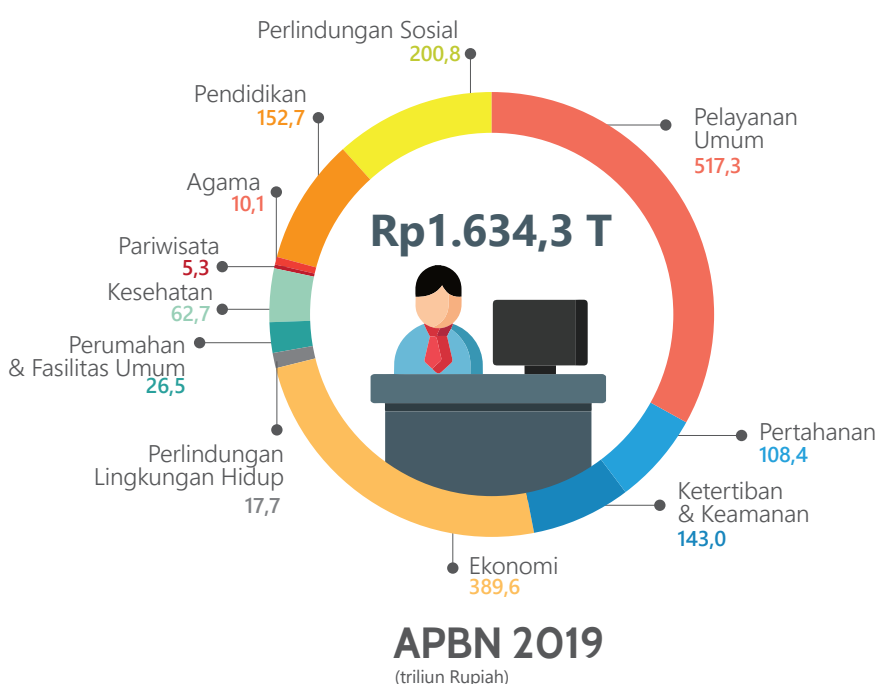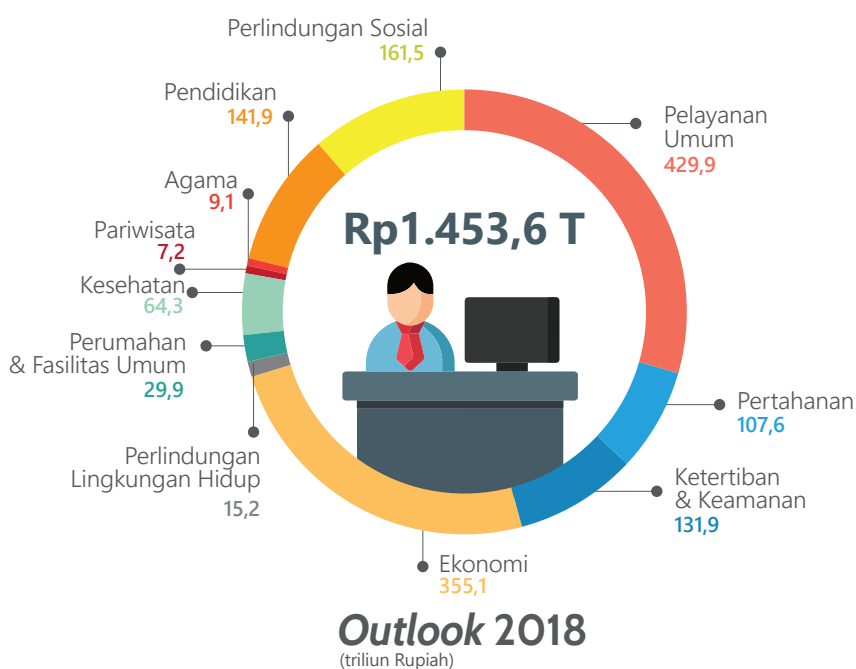
Anggaran Pendidikan

tetap dijaga 20% APBN, diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas SDM

Melalui **Belanja Pemerintah Pusat**
163,1
142,1

Melalui **Transfer ke Daerah & Dana Desa***
308,4
248,2

Melalui **Pengeluaran Pembiayaan****
21,0
-

2019 2015

* Perkiraan pemanfaatan DAU untuk gaji dan tunjangan guru serta program pendidikan lainnya
** Termasuk dana abadi penelitan sebesar Rp0,99 T
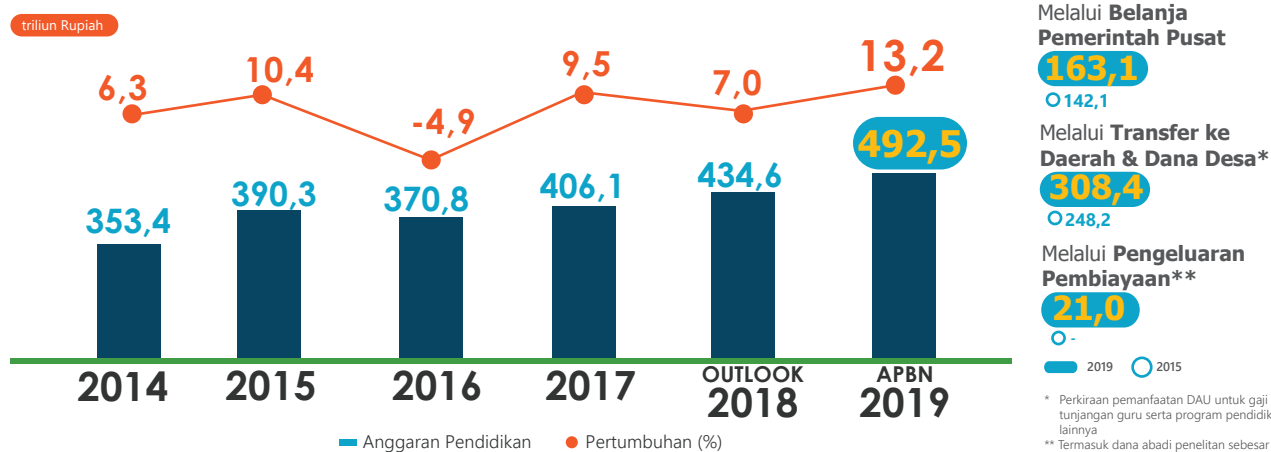
Indikator Pendidikan

● 2019 ● 2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
● 71,98 ● 69,55

APM Pendidikan SMP/Sederajat
● 82,02 ● 79,42

APM Pendidikan SMA/Sederajat
● 67,48 ● 55,26

Peningkatan Kualitas

a. **Peningkatan kualitas guru** melalui sertifikasi dan redistribusi guru antardaerah
b. **Peningkatan efektivitas BOS**
   - Pengalihan BOS dari Kemendikbud ke DAK (2016)
   - BOS berdasarkan kinerja (2019)

Perbaikan Akses

a. **Program Indonesia Pintar 19-20 juta siswa/tahun** → diikuti peningkatan ketepatan sasaran
b. **Percepatan pembangunan sarpras sekolah dan universitas** (sebagian dilaksanakan Kemen PU PR, dan DAK disupervisi Kemen PUPR)
c. **Perluasan program beasiswa afirmasi/bidik misi** (2015: 269 rb) → (2019 : 471 rb)
d. **Penguatan LPDP dalam bentuk SWF** selaku pengelola dana abadi Pendidikan mulai tahun 2017, serta akan menyalurkan 27 ribu beasiswa sampai dengan tahun 2019.

Penguatan Sinergi

a. **Sinergi Penganggaran** KL dan DAK
b. ***Enforcement*** pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda
c. ***Link and match*** pendidikan vokasi

Anggaran Pendidikan

Peningkatan efektivitas dan peningkatan ketepatan sasaran

Capaian dan Target Pembangunan Pendidikan

Program Indonesia Pintar (juta siswa)

2015	2016	2017	2018	2019
20,5	20,7	19,9	19,6	20,1

Penerimaan beasiswa LPDP (ribu siswa)

2015	2016	2017	2018	2019
4,6	7,2	1,0	5,0	6,0

Beasiswa Bidik Misi (ribu mahasiswa)

2015	2016	2017	2018	2019
269,2	331,8	364,4	401,7	471,8
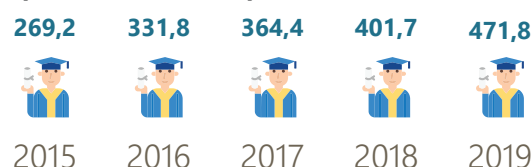
Bantuan Operasional Sekolah (juta jiwa)*

2015	2016	2017	2018	2019
16,9	62,4	52,7	56,2	55,8

* melalui Kemenag dan DAK

Pembangunan/Rehab Ruang Kelas

2015	2016	2017	2018	2019
24,6*	28,4*	81,7	58,3	56,9**

*) Data capaian DAK tidak tersedia
**) Termasuk yang akan dibangun oleh KemenPUPR

TPG PNS (juta guru)

2015	2016	2017	2018	2019
1,6	1,5	1,4	1,5	1,4

Anggaran Pendidikan

Pendidikan Vokasi

untuk peningkatan kualifikasi sumber daya manusia dalam menghadapi dunia kerja

Kebijakan

- Mendorong keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
- Penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan teknologi
- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik vokasi
- Revitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada 12 Politeknik
- Pemberian beasiswa untuk pendidikan vokasi melalui LPDP
- Penyusunan regulasi terkait sistem dan mekanisme pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan (SNP)
- Kebijakan vokasi akan dikoordinasikan Kemenaker

Alokasi Vokasi melalui Belanja K/L

2019

Kemenaker, a.l:
- Pelatihan 235 ribu naker
- Peningkatan kompetensi 6.711 instruktur/tenaga pelatihan
- Sertifikasi 526 ribu tenaga kerja pembangunan sarpras (kelas dan laboratorium) 1.000 pesantren @Rp1 miliar.

Kemenristekdikti, a.l. :
- Revitalisasi 12 Politeknik
- Bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa
- Pendidikan vokasi untuk 127,8 ribu mahasiswa

Kemenpar, a.l. :
- Peningkatan kualitas Poltekpar dan kapasitas pengajar

Kemenhub, a.l. :
- Diklat vokasi di 26 lembaga diklat (491 ribu orang)

Kemendikbud, a.l. :
- 1.407 ruang praktek SMK
- BOP Vokasi Paket C untuk 240 ribu orang
- Peralatan pendidikan SMK 6 ribu paket

Kemenperin, a.l. :
- Diklat Tenaga Kerja Industri Kompeten • Sistem 3 in 1 (70 ribu orang)
- *Pilot Project Learning Factory* berbasis Industri 4.0
- 10 politeknik industri berbasis kompetensi menuju *dual system*

Anggaran Kesehatan

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan *stunting*
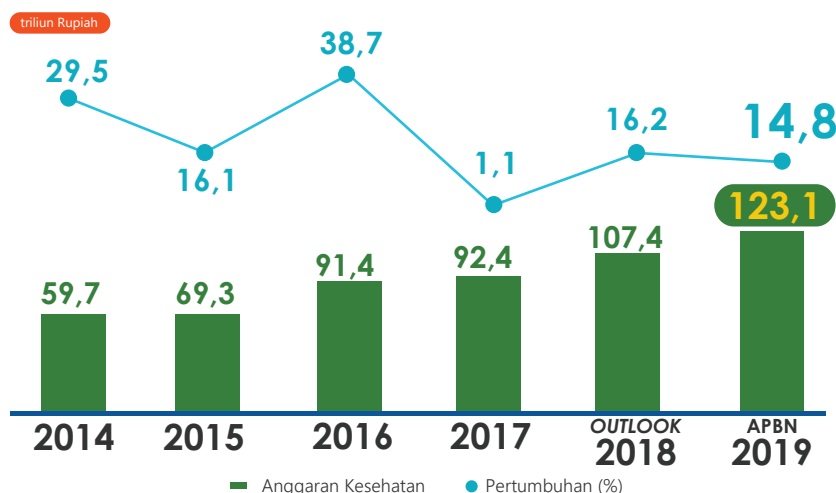
Melalui **Belanja Pemerintah Pusat**

58,1

Melalui **Transfer ke Daerah & Dana Desa**

6,3

2015

Indikator Kesehatan
● 2019 ● 2015

	2019	2015
Stunting	24,8%	29,0%
Prevalensi Tuberkulosis per 100 ribu penduduk	245	263
Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	300	232

Perbaikan Akses

a. **Perluasan Penerima Bantuan Iuran** dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (**2015: 86,4 juta jiwa; 2019: 96,8 juta jiwa)** → diikuti peningkatan ketepatan sasaran
b. Perbaikan pelayanan di **fasilitas kesehatan tingkat pertama**

Peningkatan Kualitas

a. Peningkatan kualitas dan ketersediaan **tenaga kesehatan**
b. Peningkatan efektivitas **BOK dan BOKB**
   - Pengalihan BOK dan BOKB dari Kemenkes ke DAK (2016)
c. Penguatan program ***promotive*** dan ***preventif***
   - Mendorong pola hidup sehat melalui Germas
   - Peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita dan imunisasi

Penguatan Sinergi

a. **Sinergi Penganggaran** KL dan DAK
b. ***Enforcement*** pemenuhan anggaran kesehatan oleh Pemda
c. **Mendorong KPBU** untuk pembangunan RS di daerah
d. Penguatan upaya penanganan ***stunting***

Anggaran Kesehatan

Penguatan program promotif, preventif, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan menjaga keberlanjutan JKN

Capaian dan Target Pembangunan Kesehatan

Kartu Indonesia Sehat (juta jiwa PBI)

2015	2016	2017	2018	2019
86,4	91,1	92,1	92,4	96,8

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Sertifikasi obat dan makanan (ribu)

Kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses (juta)

Anggaran Infrastruktur

Diarahkan untuk mendukung penguatan konektivitas, penyediaan perumahan, dan ketahanan pangan
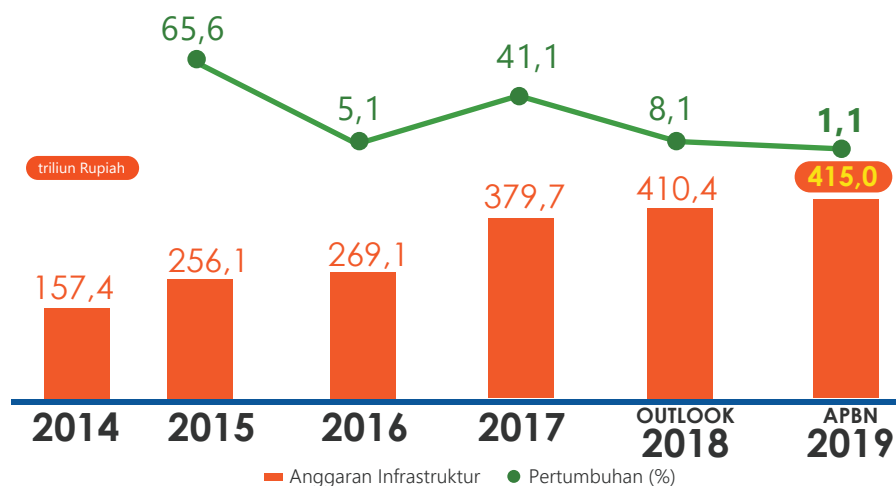
Melalui **Belanja Pemerintah Pusat**

2015: 183,0

Melalui **Transfer ke Daerah & Dana Desa***

196,2

2015: 39,1

* termasuk pemanfaatan 25% DTU untuk infrastruktur

Melalui **Pembiayaan**

2015: 34,1

Indikator Pembangunan Infrastruktur

● 2019 ● 2015

Prosentase Kondisi mantap jalan

● 94 ● 93

Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia

● menuju 40 ● menuju 114

Presentase RT yang menempati hunian layak

● 50,0 ● 2018 47,8

- **Peningkatan efektivitas** alokasi anggaran infrastruktur dan memperbaiki eksekusi proyek infrastruktur;

- **Fokus infrastruktur konektivitas, dan peningkatan kapasitas produksi** al: jalan, bandara, pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan, irigasi bendungan serta embung

- **Mengoptimalkan peran Pemda, melalui transfer ke daerah:**
  - DAK untuk bidang infrastruktur seperti: jalan, irigasi, sanitasi dan perumahan.
  - 25 % DTU untuk infrastruktur (sejak 2017)
  - Dana desa untuk mendukung infrastruktur (sejak 2015)

- **Mengoptimalkan peran BUMN dan Swasta**
  - Investasi Pemerintah (termasuk PMN) untuk mendukung infrastruktur: LMAN untuk penyediaan lahan (mulai 2016), PMN untuk penugasan pembangunan infrastruktur
  - Pemberdayaan BUMN dan swasta melalui skema KPBU, seperti VGF (mulai 2015), PDF, penjaminan, dan KPBU AP (mulai 2019).

- **Meningkatkan koordinasi lintas sektoral** termasuk dengan Pemda

- **Mendorong komitmen pembangunan** sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L terkait infrastruktur

Anggaran Infrastruktur

Penguatan pembangunan infrastruktur melalui terobosan pembiayaan kreatif untuk akselerasi penuntasan infrastruktur

Capaian dan Target Pembangunan Infrastruktur
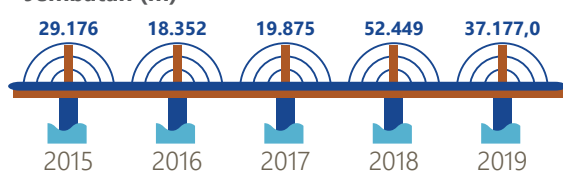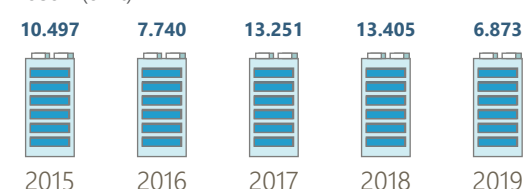
KPBU

Keterlibatan peran swasta dan BUMN dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui *creative financing* antara lain melalui skema KPBU AP pada tahun 2019 diharapkan mencapai Rp9,38 T
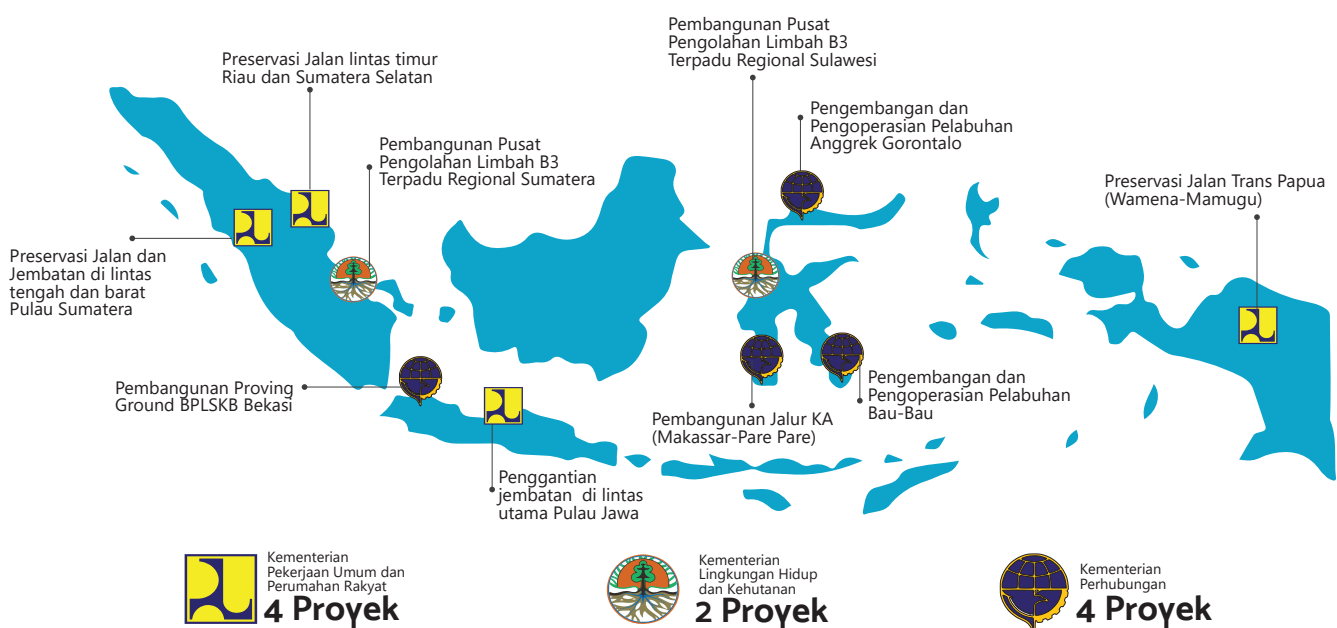
Untuk memenuhi percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah dituntut untuk mencari skema pendanaan kreatif (*creative financing*), anatra lain skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU/*Public Private Partnership* (PPP) adalah sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha (swasta).

Salah satu poin penting dari skema KPBU, selain mendorong swasta untuk ikut membangun infrastruktur melalui pembagian risiko kepada pihak yang paling tepat. KPBU dapat meningkatkan kualitas APBN/APBD, mengurangi tekanan pengeluaran APBN/APBD, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas dari sebuah proyek infrastruktur.

Anggaran Perlindungan Sosial

Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dari Pencapaian *Single Digit* (9,82%) di tahun 2018 menjadi 8,5% – 9,5% di tahun 2019
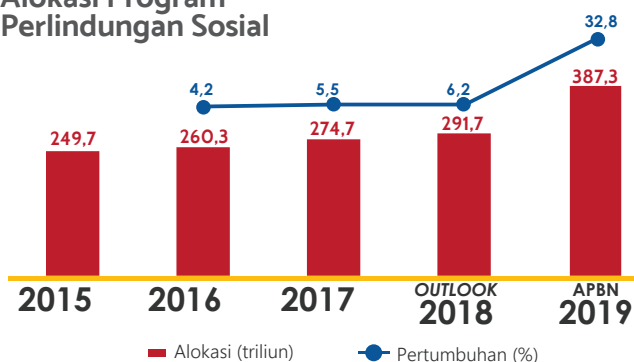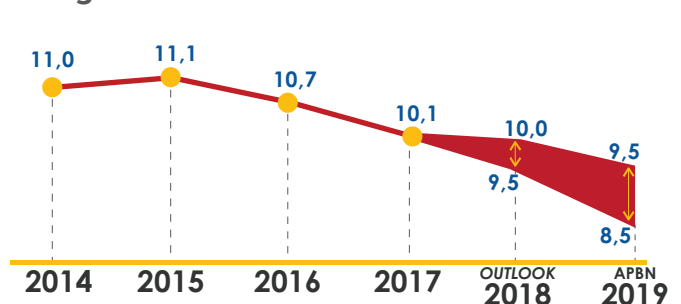
Memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya bagi 40% penduduk termiskin

Peningkatan peserta PBI JKN menuju ke 96,8 juta jiwa

Memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat (bersyarat) dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.

Sasaran Bantuan Pangan nontunai ditingkatkan bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat.

Memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) untuk penataan aset produktif dan keberpihakan terhadap para petani dan rakyat kecil

Mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM):

- insentif perpajakan khusus berupa tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%,
- fasilitas kredit usaha rakyat melalui pemberian subsidi bunga kepada 12,8 juta debitur lama dan 4 juta debitur baru
- penyaluran dana bergulir untuk peningkatan akses dan penguatan modal bagi UMKM, termasuk usaha mikro pesantren.

Anggaran
Perlindungan Sosial

Sasaran dan Alokasi Penanggulangan Kemiskinan serta Dukungan pada Masyarakat Berpendapatan Rendah
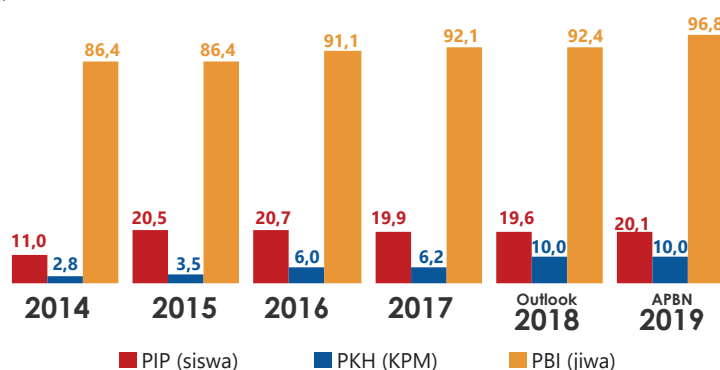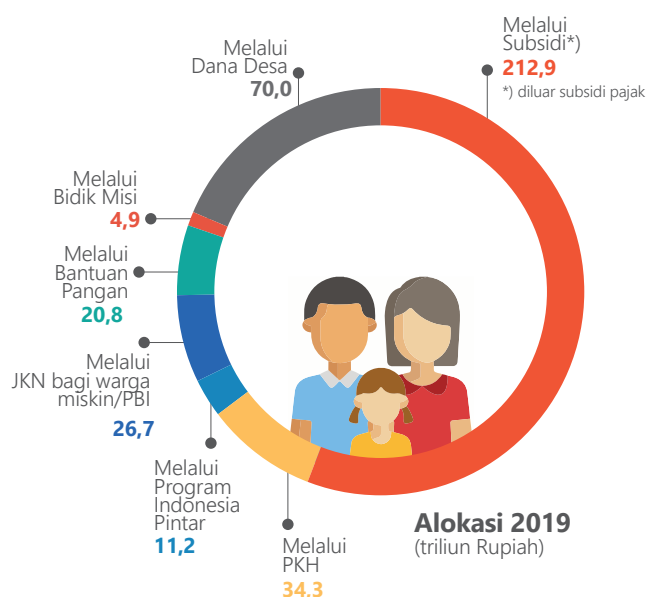
Penerima PIP, PKH, dan PBI (juta)

Memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya bagi 40% penduduk termiskin.

Sasaran dan alokasi penanggulangan kemiskinan

Bidang Pendidikan

Program Indonesia Pintar **20,1** juta siswa

Bidik Misi **471,8** ribu mahasiswa

Bidang Kesehatan

JKN bagi warga miskin/PBI **96,8** juta jiwa

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bantuan sosial pangan/ BPNT **15,6** juta KPM

Program Keluarga Harapan

PKH **10** juta KPM

*) termasuk *safeguarding*

Bidang Pemberdayaan Rakyat

Dana Desa **74.953** Desa

Pembiayaan Ultra Mikro **1,4** juta debitur

Anggaran Subsidi

diarahkan agar lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran nontunai, melalui berbagai kebijakan di subsidi energi maupun nonenergi

Kebijakan 2019

- **Subsidi** yang lebih tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang kurang mampu
- **Mendukung** pengendalian inflasi
- **Mempertahankan** daya beli masyarakat
- **Meningkatkan** produksi pertanian

Perkembangan Subsidi 2015-2019

(triliun Rupiah)

Pertumbuhan (%)

	2015	2016	2017	Outlook 2018	APBN 2019
Subsidi	186,0	174,2	166,4	228,2	224,3
Pertumbuhan (%)	(52,6)	(6,3)	(4,5)	37,1	(1,7)
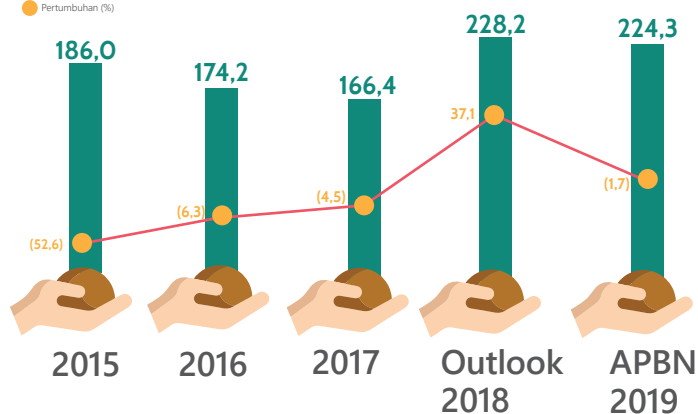
Anggaran Subsidi Menurun

Alokasi 2019 menurun sebesar Rp3,8T dari Outlook 2018

	2015	2016	2017	Outlook 2018	APBN 2019
Subsidi Energi	119,1	106,8	97,6	163,4	160,0
Subsidi Non Energi	66,9	67,4	68,8	64,7	64,3

(triliun Rupiah)
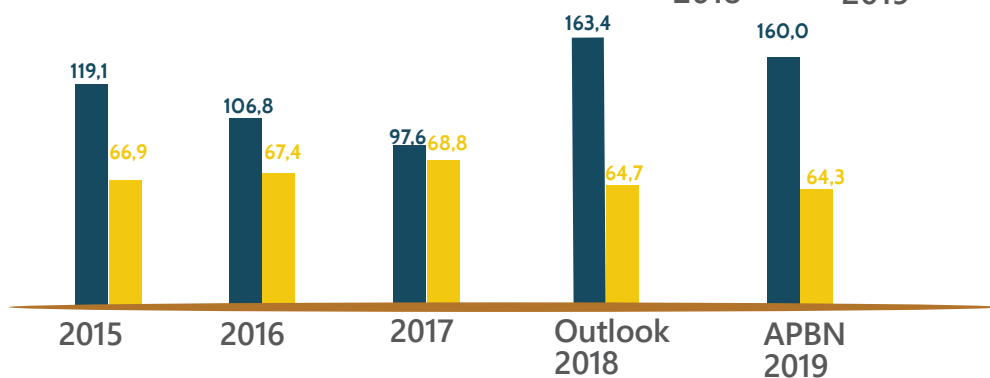
Anggaran Subsidi Energi

diarahkan agar lebih tepat sasaran dan meningkatkan porsi energi baru terbarukan

Kebijakan

Diarahkan untuk masyarakat miskin

Pengendalian inflasi

Subsidi BBM & LPG

Rp100,7 T

Kebijakan

- Perbaikan penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran
- Melanjutkan subsidi terbatas solar
- Perbaikan sasaran penerima LPG: rumah tangga, usaha mikro, kapal bagi nelayan kecil

Solar	Minyak Tanah	LPG tabung 3 kg
14,5 juta kilo liter	610 ribu kilo liter	7,0 juta ton

Subsidi Listrik

Rp59,3 T

Kebijakan

- Perbaikan penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran
- Peningkatan rasio elektrifikasi
- Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan

450 VA	900 VA miskin
23,2 juta pelanggan	6,1 juta pelanggan

Perkembangan Subsidi Energi 2015-2019

(triliun Rupiah)

	Subsidi BBM & LPG	Subsidi Listrik
2015	60,8	58,3
2016	43,7	63,1
2017	47,0	50,6
Outlook 2018	103,5	60,0
APBN 2019	100,7	59,3
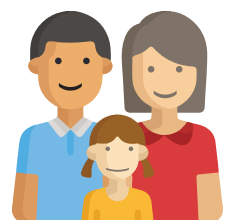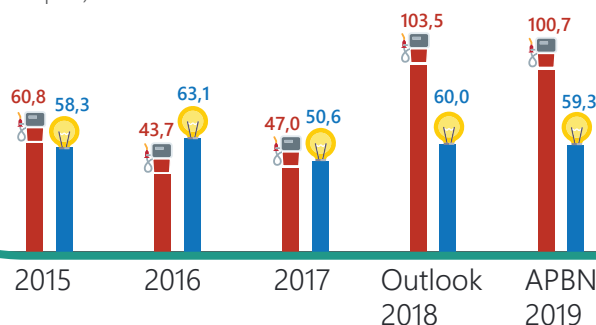
Anggaran Subsidi Nonenergi

diarahkan agar lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran nontunai

Alokasi 2019
(triliun Rupiah)

Subsidi Pupuk **Rp29,5 T**

- Penyempurnaan data penerima dengan NIK
- Volume pupuk 9,55 ton

%

Subsidi Bunga Kredit Program **Rp16,7 T**

- Akses permodalan UMKM dengan subsidi bunga KUR
- Target penyaluran KUR Rp120,0 T dan suku bunga 7%
- Akses perumahan dengan subsidi selisih bunga (SSB) kredit perumahan dan bantuan uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Subsidi Pajak **Rp11,4 T**

- Peningkatan daya saing industri tertentu didalam negeri
- Insentif sektor panas bumi dan obligasi pemerintah

Subsidi PSO **Rp6,8 T**

- Pelayanan publik bidang transportasi dan penyediaan informasi publik

Kebijakan

- Peningkatan produktifitas pertanian
- Perbaikan dan pelayanan umum bidang transportasi
- Meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan

Perkembangan Subsidi Nonenergi 2015-2019

(triliun Rupiah)

	2015	2016	2017	Outlook 2018	APBN 2019
Pangan	21,8	22,1	19,5	-	-
Pupuk	31,3	26,9	28,8	36,5	29,5
Pajak	8,5	9,3	9,2	10,8	11,4
PSO	3,3	3,7	4,3	4,4	6,8
Benih	0,1	0,4	0,8	-	-
Bunga Kredit Program	1,9	5,1	6,1	13,0	16,7
Total Subsidi Nonenergi	**66,9**	**67,4**	**68,8**	**64,7**	**64,3**
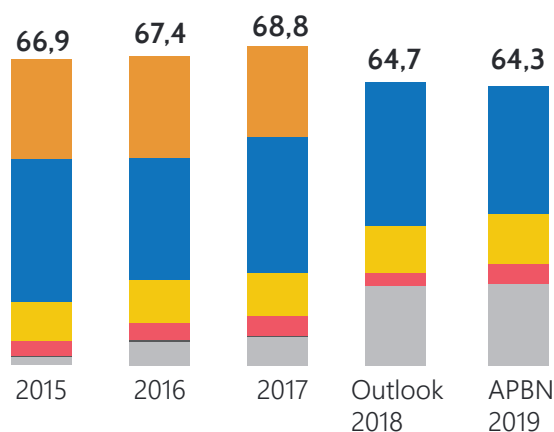
Transfer ke Daerah & Dana Desa

diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan pelayanan dasar publik antar daerah

Reformasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Memperkuat ***Taxing Power*** daerah, melalui pengalihan PBBP2 menjadi pajak daerah pada tahun 2014

Dana Desa terus meningkat dengan **penyempurnaan program prioritas dan fokus untuk mendukung penanganan kemiskinan** (skema padat karya tunai) dan pemberdayaan desa

Pengalokasian **DAK Fisik berdasarkan proposal daerah** (***proposal based***) mulai tahun 2016

Dukungan pendanaan kelurahan melalui DAU Tambahan sebesar Rp3,0 T

DAU 2019 **bersifat final** untuk meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD dan afirmasi daerah berciri kepulauan

Pengalokasian **BOS berbasis kinerja** pada tahun 2019

Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH dan *sharing* beban bila harga migas melampaui target diikuti kenaikan subsidi

Penyaluran TKDD (Dana Transfer Khusus dan Dana Desa) **berbasis kinerja penyerapan dan capaian output** dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN sejak 2017

Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2014-2019

(triliun Rupiah)
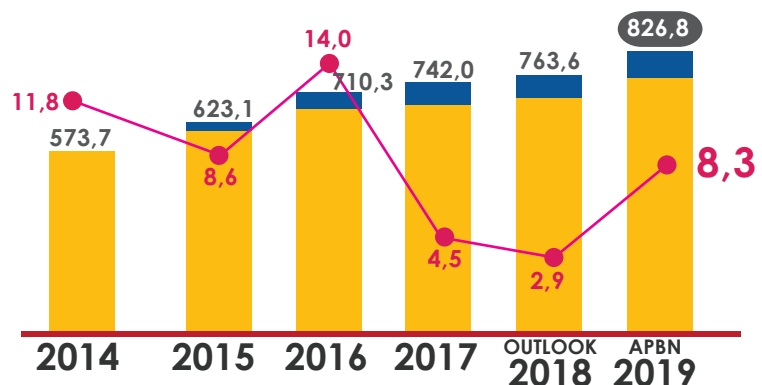
Transfer ke Daerah & Dana Desa

Dana Transfer Umum

Penguatan pengelolaan DTU sejalan dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan publik
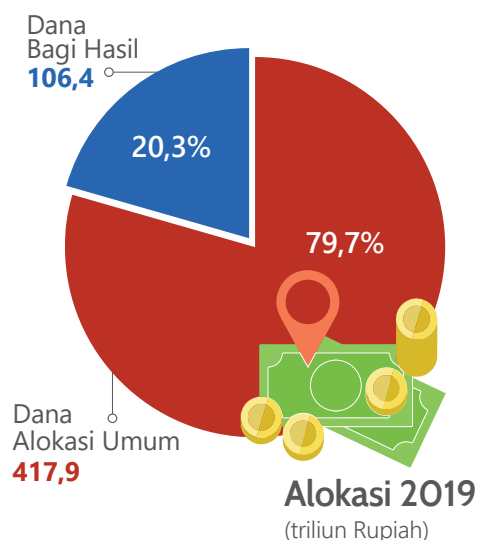
Dana Alokasi Umum Rp417,9 T

- Pagu bersifat final
- Memperhitungkan kenaikan gaji pokok 5%, gaji ke-13, THR, dan formasi CPNS Daerah
- DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan Rp3,0 T

Dana Bagi Hasil Rp106,4 T

- Minimal 50% dari BDH CHT untuk mendukung program JKN
- Penyelesaian kurang bayar DBH pada triwulan IV
- *Sharing* beban subsidi BBM dan LPG jika realisasi PNBP Migas melampaui target dalam pagu APBN

Arah Kebijakan

Mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

25% untuk belanja infrastruktur

Perkembangan Dana Transfer Umum 2014-2019

(triliun Rupiah)
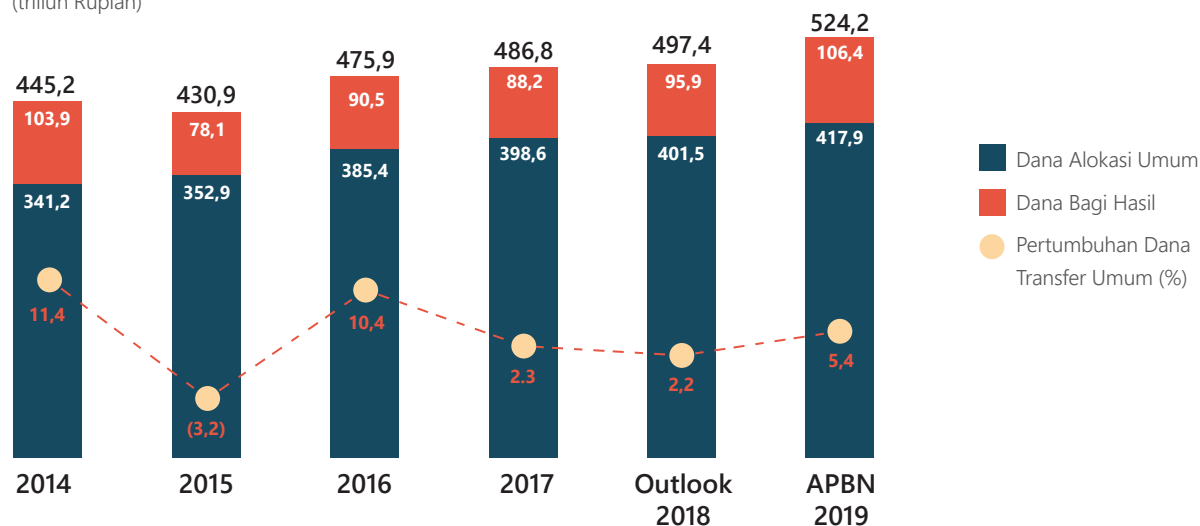
Dana Alokasi Umum Rp417,9 T

(termasuk DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan Rp3,0 T)
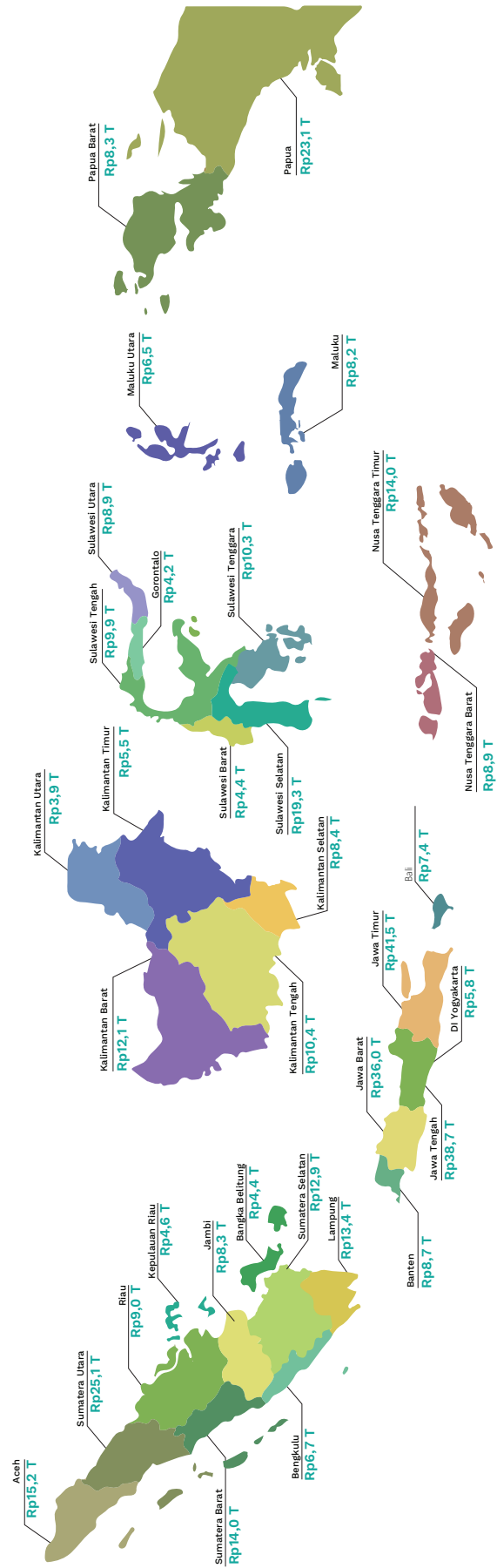
Dana Alokasi Umum Tambahan

Dukungan Pendanaan Kelurahan

Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Arah Kebijakan

- Kebijakan ini bersifat melengkapi tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- Memperkuat pengawasan dengan mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di Daerah karena pendanaan tersebut bagian dari Belanja APBD.

- Pengendalian melalui penyaluran dan penguatan pemantauan dan evaluasi.

8.212 kelurahan pada **410** kabupaten/kota

Metode Pengalokasian

dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

KATEGORI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH	DAU	PAGU
SATUAN	*DAERAH*	*KELURAHAN*	*JUTA*	*MILIAR*
BAIK	91	2.805	352,94	990,00
PERLU DITINGKATKAN	257	4.782	370,14	1.770,00
SANGAT PERLU DITINGKATKAN	62	625	384,00	240,00
TOTAL	410	8.212		3.000,00

Transfer ke Daerah & Dana Desa
Dana Transfer Khusus

Dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah
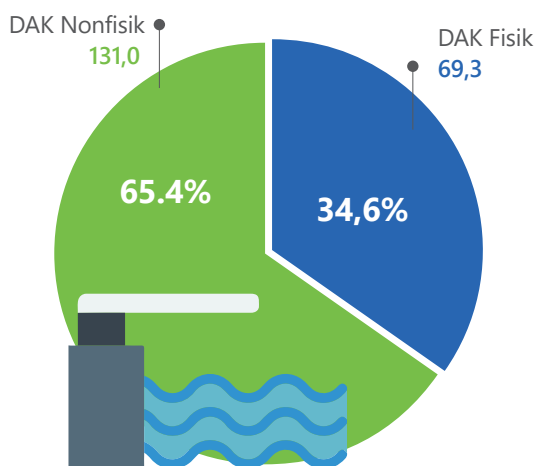
Alokasi 2019
(triliun Rupiah)

Arah Kebijakan

Berperan sebagai motor penyelaras pembangunan nasional untuk mendukung program Nawacita (terutama untuk pembangunan SDM, konektivitas, pariwisata, kesehatan, dan layanan dasar lainnya

DAK Fisik — Rp69,3 T

- Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik
- Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

DAK Non Fisik — Rp131,0 T

- Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah
- BOS untuk **47,0 juta siswa**
- Tunjangan Profesi Guru **1,2 juta guru**
- BOK **9.909 Puskesmas**

Kebijakan DAK Fisik

- **Percepatan** penyediaan infrastruktur di daerah yang terkait dengan pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM
- **Berdasarkan** usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, dan tata kelola keuangan negara yang baik
- **Penguatan** proses sinkronisasi dengan mengintergrasikan perencanaan DAK Fisik ke dalam aplikasi KRISNA

Kebijakan DAK Nonfisik

- **Perbaikan** kualitas kinerja untuk seluruh bidang DAK Nonfisik
- **Pengalokasian** berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM
- **Penguatan** kebijakan afirmasi untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)
- **Penambahan** jenis DAK nonfisik jenis baru, yaitu, BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Dana Bantuan BLPS

Transfer ke Daerah & Dana Desa

Dana Transfer Khusus

Dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah

DAK Fisik

Rp69,3 T

(triliun Rupiah)

- Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik
- Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

DAK Afirmasi 6,7

- Kesehatan 3,1 T
- Perumahan & Pemukiman 0,5 T
- Transportasi 1,5 T
- Air Minum 0,5 T
- Sanitasi 0,5 T
- Pendidikan 0,6 T

DAK Penugasan 19,0

- Pendidikan SMK 2,3 T
- Kesehatan dan KB 5,6 T
- Air Minum 0,8 T
- Sanitasi 0,8 T
- Jalan 4,0 T
- Pasar 1,8 T
- Irigasi 3,0 T
- Lingkungan Hidup & kehutanan 0,5 T
- Pariwisata 0,3 T

DAK Reguler 43,6

- Pendidikan 14,0 T
- Kesehatan dan KB 11,2 T
- Air Minum 0,8 T
- Sanitasi 0,8 T
- Perumahanan & Pemukiman 0,6 T
- Industri Kecil dan Menengah 0,5 T
- Pertanian 1,9 T
- Pariwisata 0,7 T
- Jalan 12,2 T
- Kelautan & Perikanan 0,9 T

DAK Nonfisik

Rp131,0 T

(triliun Rupiah)

- Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Rp51,2 T
--> 47,0 juta siswa

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Rp4,5 T
--> 7,5 juta peserta didik

Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah
Rp56,9 T
--> 1,2 juta guru

Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus
Rp2,3 T
--> 59,0 ribu guru

BOP Kesetaraan
Rp1,5 T
--> 925 ribu peserta didik

Pelayanan Kepariwisataan
Rp0,2 T

Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
Rp0,9 T
--> 254 ribu guru

Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)
Rp12,2 T
--> 9.909 puskesmas dan 5.920 balai penyuluhan

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
Rp0,2 T
-->56,1 ribu peserta

Pelayanan Administrasi Kependudukan
Rp0,9 T
--> 34 provinsi dan 508 kab/kota

Bantuan BLPS
Rp0,03 T

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum & Taman Budaya
Rp0,1 T
--> 111 museum dan 20 taman budaya

Transfer ke Daerah & Dana Desa
Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY

Dialokasikan kepada daerah sebagai insentif untuk peningkatan kualitas pengelolaaan keuangan daerah dan pemenuhan peraturan perundangan

Rp10,0 T
Dana Insentif Daerah

Untuk mendorong peningkatkan kualitas pengelolaaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah, kualitas pelayanan pemerintahan umum, kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan upaya pengentasan kemiskinan

Kriteria Pemberian DID

Kriteria utama
- Opini BPK atas LKPD
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan *e-government*
- Ketersediaan PTSP

Kriteria Kinerja
- Tata kelola keuangan daerah
- Pelayanan umum pemerintahan
- Pelayanan dasar publik
- Kesejahteraan masyarakat

Rp21,0 T
Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
Rp8,4 T
untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat
Rp8,4 T
terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan

Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat
Rp4,3 T
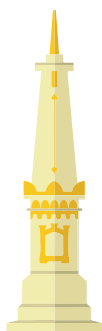
Rp1,2 T
Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DIY sesuai dengan program prioritas nasional

Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY

Mendorong percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

Transfer ke Daerah & Dana Desa

Dana Desa

Mendorong pengunaan anggaran di daerah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip *value for money*

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pembangunan Desa

Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana Alam.

Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

Arah Kebijakan

- **Meningkatkan** pagu anggaran dana desa
- **Menyempurnakan** formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan
- **Mengoptimalkan** pemanfaatan dana desa pada beberapa kegiatan prioritas desa
- **Melanjutkan** skema padat karya tunai dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana fisik
- **Meningkatkan** porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat
- **Meningkatkan** perekonomian desa, melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan produk unggulan desa, dan memberikan kemudahan akses permodalan
- **Meningkatkan** akuntabilitas pelaksanaan dana desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan
- **Sinergi** pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha
- **Penguatan** atas monev pelaksanaan kebijakan dana desa, kapasitas SDM perangkat desa, serta koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dari tingkat pemerintahan pusat, pemda, kecamatan hingga desa

Prioritas Pelaksanaan

Bahan baku lokal

Swakelola

Penyaluran

berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output yang dilakukan melalui KPPN setempat.
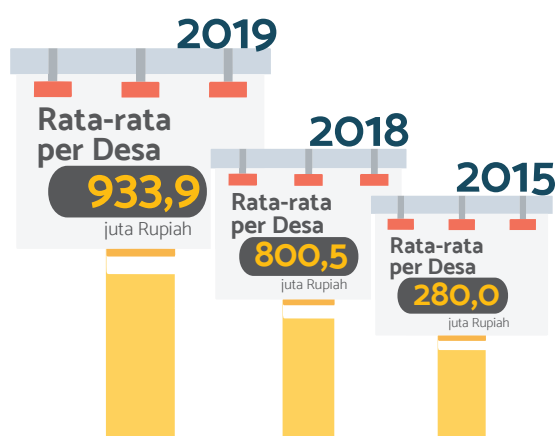
2015 74.093 desa penerima

2018 74.958 desa penerima

2019 74.953 desa penerima

Defisit Anggaran

Defisit APBN Tahun 2019

Defisit dalam APBN 2019 (1,84% thd PDB) ditekan lebih rendah dari *outlook* 2018 (2,12% thd PDB). Kebijakan defisit anggaran ditempuh untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal

*) Outlook pada Laporan Semester I tahun 2018. Sesuai proyeksi terkini, defisit APBN tahun 2018 diperkirakan dibawah 2% terhadap PDB (pada kisaran 1,8-1,9% terhadap PDB dengan defisit keseimbangan primer Rp6,7 T-Rp21,4 T)
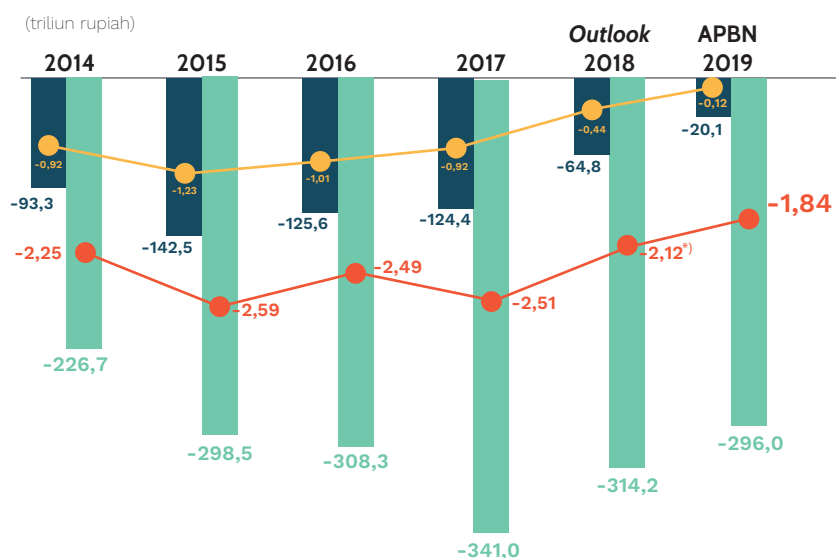
Kebijakan

- Mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan, serta efisiensi subsidi dan belanja konsumtif
- Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali
- Mendorong keseimbangan primer menuju positif
- Mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (*creative financing*)

Defisit terhadap PDB Beberapa Negara

(sumber data: IMF World Economic Outlook, Oktober 2018)
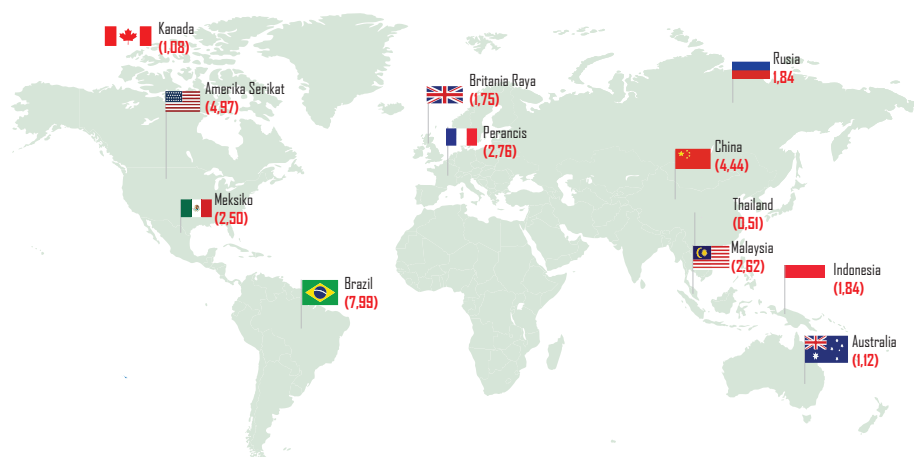
Pembiayaan Anggaran

Outlook 2018	(triliun rupiah)	APBN 2019
314,2	Pembiayaan Anggaran	296,0
387,4	Pembiayaan Utang	359,3
388,0	SBN (neto)	389,0
-0,6	Pinjaman (neto)	-29,7
-65,7	Pembiayaan Investasi	-75,9
-6,5	Pemberian Pinjaman	-2,4
-1,1	Kewajiban Penjaminan	0
0,2	Pembiayaan Lainnya	15,0

Arah Kebijakan Pembiayaan

- Meningkatkan efisiensi pembiayaan utang
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi domestik (financial deepening)
- Mengelola pinjaman luar negeri secara selektif;
- Meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional
- Mendorong program ekspor nasional

Perkembangan Pembiayaan Anggaran, 2014-2019
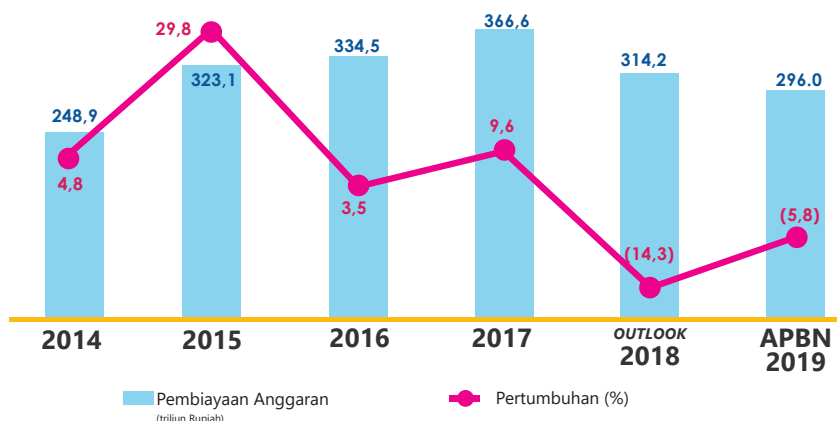
Pembiayaan Utang

dikelola secara hati-hati (*prudent*), dan produktif sehingga dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
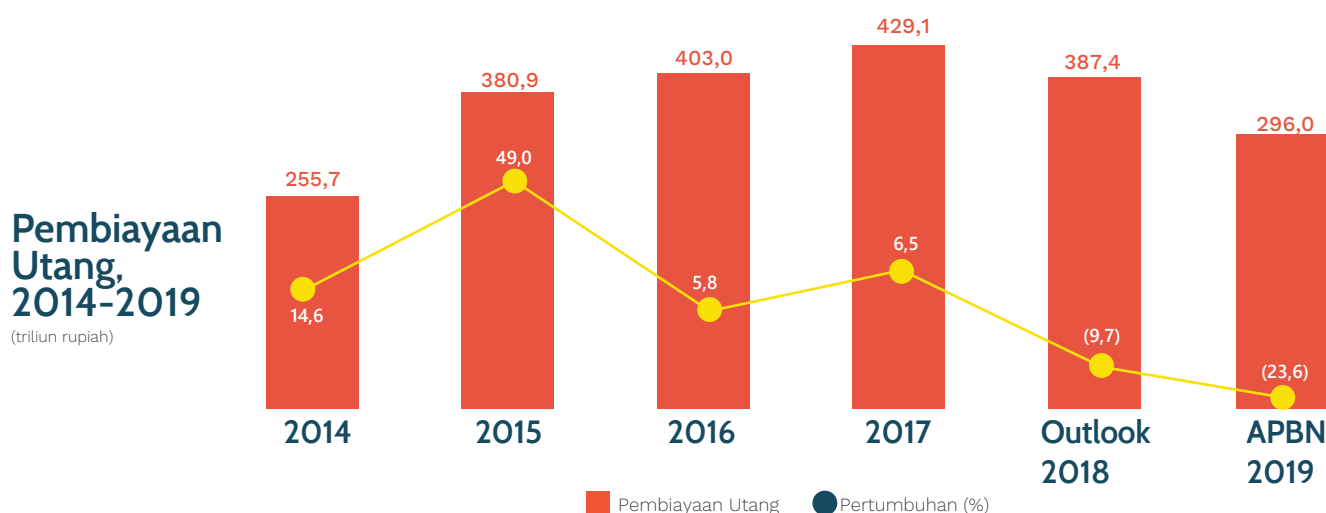
Pembiayaan Utang

membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN dan BLU, serta pemberian pinjaman kepada BUMN dan Pemda

Outstanding Utang Pemerintah

Rp4.227,8 T
(s.d. Juni 2018)

Kebijakan Pembiayaan Utang

Kehati-hatian

dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah

Produktivitas

mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan, antara lain melalui pembiayaan investasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur

Efisiensi Biaya Utang

mendorong efisiensi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal

Keseimbangan

menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi.

Profil Utang Pemerintah

Rasio utang dijaga dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun

Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2005-2018

persen (%)
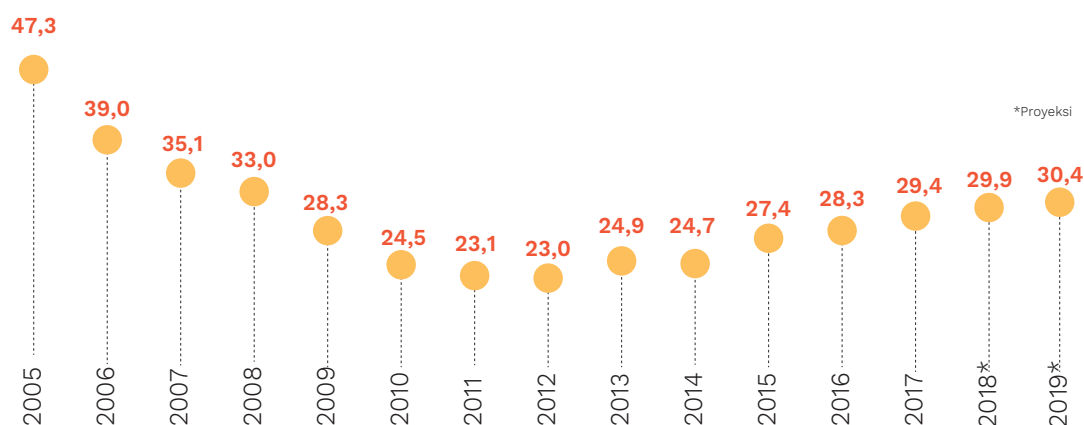
Catatan: Dalam Undang-undang Keuangan Negara diamanatkan batas maksimal 60% dari PDB

Rasio Utang Beberapa Negara Berkembang
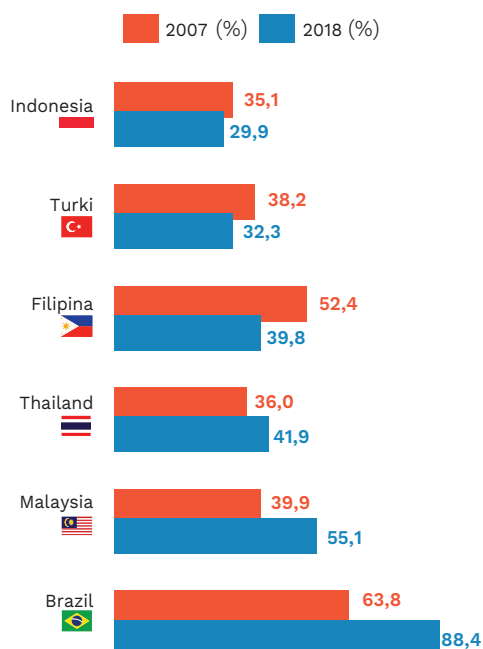
Komposisi Instrumen Utang dalam *Outstanding* Utang Pemerintah

(persen)
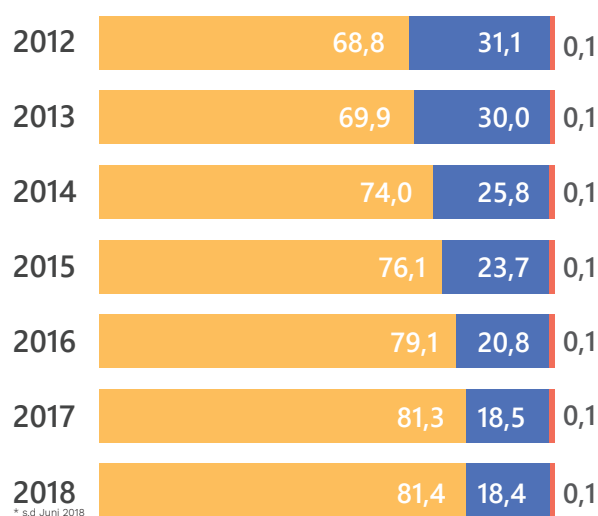
Pembiayaan Investasi

Mengakselerasi pencapaian program pembangunan
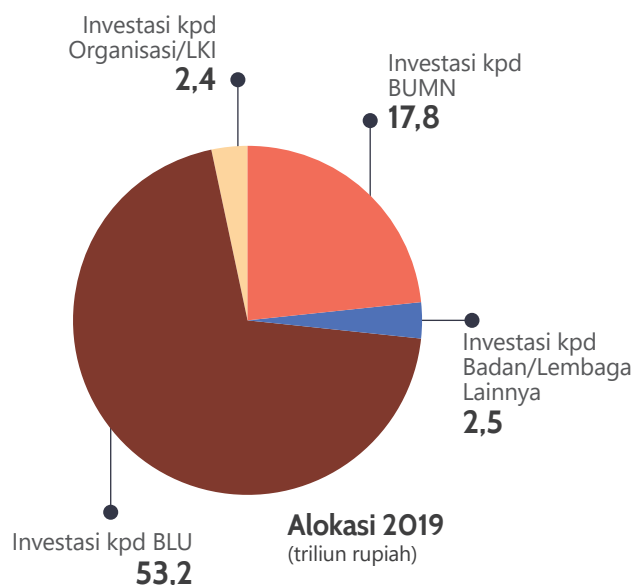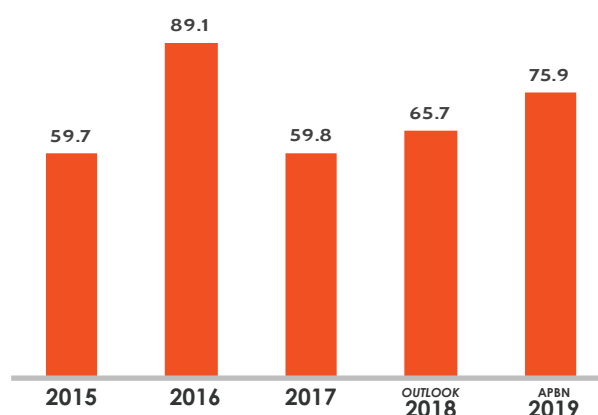
Strategi Kebijakan Pembiayaan Investasi

- Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur
- Meningkatkan akses pembiayaan usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah
- Meningkatkan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui penguatan peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai SWF Pendidikan
- Mendukung kerja sama internasional sebagai anggota Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional
- Mendorong peningkatan ekspor nasional
- Mempercepat realisasi pembiayaan investasi BLU LMAN untuk pembebasan lahan yang diperlukan dalam prioritas pembangunan nasional
- Penguatan sektor keuangan melalui sinergi BUMN dan mendukung pembangunan infrastruktur

Pembiayaan Investasi

Mendukung kebijakan pemerintah di berbagai sektor

Investasi Kepada BUMN Rp17,8 T

PT Hutama Karya
Rp10,5 T

Penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera

PT Sarana Multigriya Finansial
Rp0,8 T

Menyediakan dana dengan *cost of fund* yang lebih rendah untuk penyalur KPR FLPP

PT PLN
Rp6,5 T

Menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan

Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya Rp2,5 T

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia **Rp2,5 T**

tersedianya pembiayaan ekspor dengan suku bunga yang relatif rendah.

- **Alokasi untuk peningkatan kapasitas usaha sebesar Rp1,5 T**
- **Alokasi dalam rangka penugasan khusus ekspor sebesar Rp1,0 T**

Investasi Kepada Organisasi/LKI/ Badan Usaha Internasional Rp2,4 T

dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*)

Pembiayaan Investasi

Mendukung kebijakan pemerintah di berbagai sektor

Investasi Kepada BLU Rp53,2 T

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Rp5,2 T

Memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk KPR Sejahtera sekitar 84.000 unit rumah MBR tahun 2019

Pusat Investasi Pemerintah
Rp3,0 T

Jumlah usaha ultra mikro termasuk usaha rintisan yang mendapat fasilitas pembiayaan UMi sebanyak 600.000 debitur

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Rp20,0 T

Beasiswa bagi 6.000 mahasiswa baru dan mahasiswa lama (*ongoing student*) sebanyak 10.000 orang

Lembaga Manajemen Aset Negara
Rp22,0 T

Penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur PSN

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
Rp3,0 T

Pelaksanaan 70 kegiatan program kerja sama pembangunan internasional, kerja sama teknik untuk 1.200 orang, kerja sama pembangunan internasional kepada 66 negara dan/atau lembaga asing

Dana Abadi Penelitian
Rp1,0 T

Dana abadi untuk pembiayaan penelitian

GLOSSARY

Keseimbangan primer
menggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.

Pajak
Terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.

Kepabeanan dan Cukai
Terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.

PNBP
Terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.

Penerimaan Hibah
Terdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Tax ratio
dalam definisi luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam definisi sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Pembayaran Bunga Utang
Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.

Transfer ke Daerah
Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.

Belanja Non-K/L (BA BUN)
Pengeluaran negara untuk Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Dana Desa
Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Subsidi
Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

GLOSSARY

Belanja Menurut Fungsi, terdiri dari:

Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);

Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;

Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;

Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;

Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;

Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;

Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;

Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).

Subsidi Energi

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

Subsidi Nonenergi

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/ atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.

Dana Perimbangan

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Otonomi Khusus

diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh

GLOSSARY

Pembiayaan Anggaran
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Surat Berharga Negara
Meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Surat Utang Negara (SUN)
Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Penyertaan Modal Negara (PMN)
Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Dana Bergulir
Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Pinjaman Dalam Negeri
Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

Kewajiban Penjaminan
Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama

Pinjaman Luar Negeri Neto
Semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

Pemberian Pinjaman
Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

Data APBN dapat diakses secara cepat tanpa melalui surat permohonan data

lebih mudah

tanpa harus mendaftar terlebih dahulu, data dapat diakses di mana saja dan kapan saja, baik melalui komputer mau handphone

lebih fleksibel

Data yang disajikan dalam bentuk .xls atau .csv, sehingga dapat diolah secara langsung oleh program pemrosesan data

data-apbn.kemenkeu.go.id

 portaldataapbn portaldataAPBN